



**SAWAHLUNTO, JANUARI 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan penyesuaian atas dokumen perencanaan yang menjadi acuan kerja program dan kegiatan dalam rentang waktu lima tahunan. Sehubungan dengan adanya beberapa penyesuaian peraturan perundang-undangan dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto selaku pelaksana kebijakan dalam bidang urusan perencanaan dan bidang urusan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintah Kota Sawahlunto menyusun Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 dalam rangka menjaga sinkronisasi dan harmonisasi dengan Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Adapun dasar hukum penyusunan Perubahan Renstra secara mutatis mutandis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sementara dasar hukum nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Demikian dokumen Perubahan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 disusun dengan harapan dapat menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta perumusan kebijakan bidang urusan perencanaan dan bidang urusan penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung pencapaian visi Kota Sawahlunto 2018-2023.

**Sawahlunto, Desember 2021**  
**KEPALA BARENLITBANGDA**  
**KOTA SAWAHLUNTO**

**Ir. LELIS EPRIENTI, M.Si**  
NIP. 196212221984061001

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	lii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iv
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Ruang Lingkup	I.2
1.3 Landasan Hukum	I.4
1.4 Maksud Dan Tujuan	I.6
1.5 Sistematika Penulisan	
<b>BAB II     GAMBARAN PELAYANAN BARENLITBANGDA KOTA              SAWAHLUNTO</b>	<b>II.9</b>
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Barenlitbangda Kota Sawahlunto	II.9
2.2 Sumber Daya Barenlitbangda Kota Sawahlunto	12
2.2.1 Kondisi Kepegawaian	II.20
2.2.2 Kondisi Sarana Dan Prasarana	II.22
2.3 Kinerja Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto	II.23
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Barenlitbangda Kota sawahlunto.	II.30
<b>BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS</b>	<b>III.34</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto	III.34
3.2 Telahaan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Darah Terpilih.	III.35

3.3	Telahaan Renstra Kementerian/Lembaga Dan renstra Propinsi	III.40
3.4	Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	III.44
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis.	III.48
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	IV.49
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>	V.57
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	VI.64
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	VII.103
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	VIII.107

## DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Kontrak Barenlitbangda Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021	II.21
TABEL 2.2	Perlengkapan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2021	II.23
TABEL 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2020	II.25
TABEL 2.4	Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2019-2021	II.24
TABEL 2.5	Analisis SWOT	II.32
TABEL 3.1	Pemetaan Permasalahan Barenitbangda Kota Sawahlunto	III.34
TABEL 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III.39
TABEL 3.3	Permasalahan Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Propinsi Sumatera Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	III.43
TABEL 3.4	Telaahan RTRW dan KLHS terkait Barenlitbangda Kota Sawahlunto	III.47
TABEL 4.1	Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2018-2023 ( <i>Sebelum Perubahan</i> )	IV.50
TABEL 4.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2021-2023 ( <i>Setelah Perubahan</i> )	IV.51
TABEL 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan program Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah ( <i>Sebelum Perubahan</i> )	V.59
TABEL 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan program Badan	V.61

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
(Sesudah Perubahan)

TABEL 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan tahun 2018 – 2020 Barenlitbangda Kita Sawahlunto (Sebelum Perubahan)	VI.66
TABEL 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan tahun 2021 – 2023 Barenlitbangda Kita Sawahlunto (Setelah Perubahan)	VI.84
TABEL 7.1	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 (Sebelum Perubahan).	VII.103
TABEL 7.2	Rencana Induk Indikator Kinerja Utama (IKU) Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2021-2023 (Setelah Perubahan)	VII.104

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Penjabaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	I.2
GAMBAR 1.2	Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	I.3
GAMBAR 2.1	Tugas Dan Fungsi Penunjang Pemerintahan Barenlitbangda Kota Sawahlunto.	II.9
GAMBAR 2.2	Bagan organisasi Barenlitbangda	II.20
GAMBAR 2.3	Komposisi Pegawai Barenlitbangda Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	II.21
GAMBAR 2.4	Komposisi Pegawai Barenlitbangda Kota Sawahlunto Berdasarkan Golongan Tahun 2021	II.22
GAMBAR 3.1	<i>Kontribusi Barenlitbangda dalam Mendukung Pencapaian Visi – Misi Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018-2023</i>	III.37
GAMBAR 3.2	Kerangka Pikir Perumusan Arah Kebijakan	III.46
GAMBAR 5.1	Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Barenlitbangda Kota Sawahlunto.	V.58
GAMBAR 6.1	Kerangka Alur Pikir Penentuan Indikator outcome Program Utama pada Perubahan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2021 – 2023.	VI.82

## DAFTAR GRAFIK

	Komposisi Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)	II.22
GRAFIK 2.1	Dan Kontrak Barenlitbangda Kota Sawahlunto Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021.	



# **B A B I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar waktu maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (7), yaitu “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.”

Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1), yang mengamanatkan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD” yang selanjutnya di jelaskan dalam Pasal (2) yaitu “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Daerah.”

Penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah menerapkan ketentuan mutatis mutandis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 359. Proses penyusunan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018– 2023 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra dan telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal RPJMD Perubahan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Memasuki tahun keempat pelaksanaan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, telah dilakukan evaluasi yang menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan Renstra. Evaluasi mengidentifikasi beberapa ketidak sesuaian dari berbagai perkembangan khususnya perubahan kebijakan nasional, provinsi dan Kota

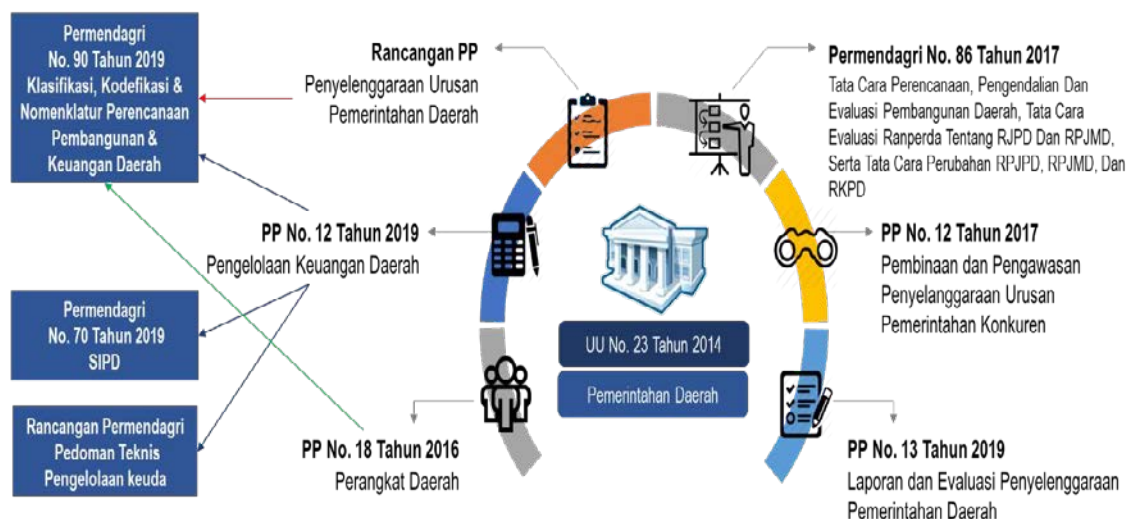
Perubahan kebijakan Kota pada lingkup peraturan perundang-undangan terkait perencanaan dan keuangan daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi dasar normatif yang perlu dipenuhi. Indikator Kinerja Daerah penunjang urusan pemerintahan dalam bidang Perencanaan yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 menjadi acuan yang perlu ditindaklanjuti

dalam Indikator Kinerja Utama Kepala Barenlitbangda Kota Sawahlunto dalam Renstra Perubahan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. diantaranya terkait perubahan susunan Perangkat Daerah dan Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto, serta penyesuaian permasalahan / isu strategis pembangunan Kota Sawahlunto serta perubahan kebijakan terkait program kegiatan di Kota Sawahlunto, perlu dilakukan perbaikan terhadap substansi Rencana Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Barenlitbangda dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sawahlunto, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

## 1.2 Ruang Lingkup

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen Renstra pada dasarnya menjabarkan suatu rencana strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang akan dicapai lima tahun mendatang secara komprehensif untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu institusi pemerintahan. Penjabaran keterkaitan dokumen perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan daerah, perangkat daerah, dan pengelolaan keuangan daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tercantum dalam Gambar 1.1.

**Gambar 1.1 Penjabaran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

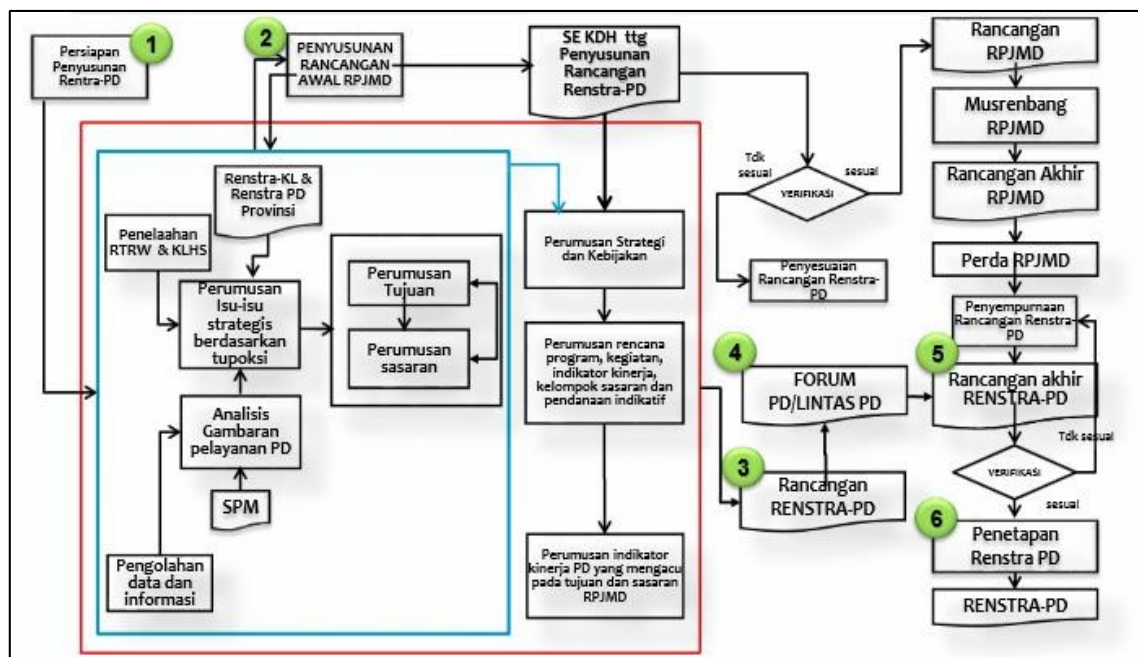


Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Perubahan Renstra Barenlitbanda bermuara pada perubahan nomenklatur daftar kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dalam melaksanakan kewenangan dan tugas pokok dan fungsi Barenlitbangda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peraturan tersebut dipedomani oleh seluruh Pemerintah Daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju “Single Codebase” untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan. Kodifikasi dan Nomenklatur Program/Kegiatan dan Belanja Daerah tersebut merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan sinkronisasi tata kelola penyelenggaraan pemerintah. Hal ini berimplikasi pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan tata cara pengelolaan yang baru.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Barenlitbangda Tahun 2018-2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.2.

**Gambar 1.2 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Proses penyusunan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018–2023 sesuai alur tersebut, juga dilakukan melalui tahapan:

- 1) Menyusun komponen pendukung parameter keberhasilan pembangunan Barenlitbangda Kota Sawahlunto
- 2) Menganalisis komponen tersebut dengan pendekatan *logical framework*; dan /

- 3) Menghasilkan pengukuran dalam perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban setiap Perangkat Daerah dan keterukuran dalam evaluasi.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Barenlitbangda juga sebagai alat dalam mengelola keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga. Tindak lanjut perubahan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 menjadi dasar perubahan Rencana Kerja (Renja) Barenlitbangda Tahun 2021 dan penyusunan Renja Barenlitbangda Tahun 2022 dan Tahun 2023. Keselarasan antara perencanaan lima tahunan di Perubahan Renstra Barenlitbangda dengan perencanaan tahunan dalam Renja Barenlitbangda merupakan perwujudan operasional Barenlitbangda sebagai perangkat daerah di Kota Sawahlunto.

### **1.3 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018–2023 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara nomor 4816);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 85);
26. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023
27. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Barenlitbangda beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Barenlitbangda secara berkesinambungan, yang selanjutnya diharapkan dapat mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas guna mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kota Sawahlunto. Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 adalah :

- a. Menjadi kerangka dasar bagi Barenlitbangda Kota Sawahlunto dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2018–2023, dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018–2023 sesuai tugas dan fungsi Barenlitbangda.
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Barenlitbangda Kota Sawahlunto secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja.
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang merupakan dokumen perencanaan tahunan untuk selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Secara lebih khusus, maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 adalah untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, penyesuaian perkembangan permasalahan / isu strategis pembangunan serta perubahan kebijakan terkait program kegiatan di Kota Sawahlunto. Adapun tujuannya yaitu untuk melakukan perbaikan substansi Rencana Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan tahunan Barenlitbangda, dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sawahlunto sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Perubahan Rencana Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I       PENDAHULUAN**

Bab I berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II       GAMBARAN   PELAYANAN    BARENLITBANGDA    KOTA SAWAHLUNTO**

Bab II berisi gambaran pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi; sumber daya; kinerja pelayanan; serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

##### **BAB III     PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BARENLITBANGDA KOTA SAWAHLUNTO**

Bab III berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto; telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

##### **BAB IV     TUJUAN DAN SASARAN**

Bab IV berisi rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

##### **BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab V berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab VI berisi rencana program dan kegiatan dengan indikator kinerjanya disertai pendanaan indikatif.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab VII berisi indikator kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang secara langsung menunjukkan kinerja sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII PENUTUP**

Bab VIII berisi penutup dari Perubahan Rencana Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2016 – 2021



## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN BARENLITBANGDA KOTA SAWAHLUNTO

## 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BARENLITBANGDA KOTA SAWAHLUNTO

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota di bidang perencanaan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

**Gambar 1.3 Tugas Dan Fungsi Penunjang Pemerintahan  
Barenlitbangda Kota Sawahlunto**



Adapun Fungsi dan tugas dari Kepala, Sekretaris dan masing-masing Bidang sesuai Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto dirinci sebagai berikut :

### (1) Kepala

- a) Kepala Barenlitbangda mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah serta penelitian dan pengembangan.
- b) Kepala Barenlitbangda mempunyai fungsi :
  - Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  - Pengkoordinasian penyelenggaraan fungsi penunjang pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
  - Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;

- Pengkoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- Pengkoordinasian pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi Daerah;
- Pengkoordinasian pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

## **2) Sekretariat**

- a). Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.
- b). Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - Penyiapan bahan koordinasi, pengolahan data dan penyusunan program kerja dilingkungan Barenlitbangda;
  - Penyiapan bahan administrasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
  - Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - Pengelolaan persuratan/ e-office dan menganalisa ketatausahaan, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan protokol; dan
  - Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kerja Barenlitbangda.

### **2.1 Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian**

- a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, inventaris dan pengelolaan administrasi kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- b) Dalam menjalankan tugas pokok tersebut diatas Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - Melaksanakan dan memberikan pelayanan dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian;
  - Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap inventaris dan perlengkapan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
  - Mengarsipkan seluruh naskah serta naskah perencanaan pembangunan.
  - Membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
  - Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kegiatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kepada Sekretaris.

- Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai ruang lingkup tugasnya.

## **2.2 Sub Bagian Program dan Pelaporan**

- a) Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyusun program kerja, menghimpun data, memonitor, mengevaluasi dan menyusun laporan serta mendokumentasikan hasil pembangunan.
- b) Dalam menjalankan tugas pokok tersebut diatas Kepala Sub. Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - Pelaksanaan proses penyusunan program kerja, bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan badan.
  - Pengumpulan dan penatausahaan naskah, program kerja dan laporan badan.
  - Pelaksanaan kegiatan pendokumentasian dan memberikan informasi tentang rencana, program dan hasil pelaksanaan kegiatan badan.
  - Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
  - Penyampaian laporan kegiatan rutin maupun berkala kepada Sekretaris.
  - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## **2.3 Sub Bagian Administrasi Keuangan**

- a) Sub. Bagian Administrasi Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan anggaran Barenlitbangda.
- b) Dalam menjalankan tugas pokok tersebut diatas Kepala Sub. Bagian Administrasi Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - Meneliti kelengkapan dan keabsahan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) berikut dokumen lampirannya yang diajukan Bendaharawan Pengeluaran sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - Melakukan verifikasi dan penelitian kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara.
  - Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
  - Menyiapkan surat pengesahan pertanggung jawaban belanja maupun pertanggungjawaban penerimaan yang diajukan bendahara.
  - Melaksanakan proses akuntansi Barenlitbangda.
  - Menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan Barenlitbangda terdiri dari Neraca, Aliran Kas, Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan Barenlitbangda.
  - Melaksanakan ketatusahaan keuangan Barenlitbangda.
  - Membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
  - Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kegiatan Barenlitbangda kepada Sekretaris.
  - Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai ruang lingkup tugasnya.

### **3). Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

- a). Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang perencanaan pembangunan ekonomi.
- b). Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, bidang ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang perencanaan pembangunan ekonomi.
  - Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang perencanaan pembangunan ekonomi.
  - Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di bidang perencanaan pembangunan ekonomi.
  - Pengkoordinasian, fasilitasi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan keistimewaan bidang ekonomi.
  - Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, dan
  - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja di bidang perencanaan pembangunan ekonomi.

#### **3.1 Sub Bidang Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kewirausahaan**

- a) Sub Bidang Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kepariwisata dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah, menyiapkan bahan penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan serta peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bidang Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kewirausahaan mempunyai fungsi :
  - Mengkaji, menganalisa dan mensinkronkan naskah perencanaan di bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.
  - Menelaah naskah rencana pembangunan bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan dari lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
  - Mengkaji dan menganalisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan.
  - Melaksanakan kajian dan mendokumentasikan naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
  - Membagai tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
  - Menyampaikan laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang.
  - Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **3.2 Sub Bidang Pembangunan Ekonomi Kerakyatan**

- a) Sub Bidang Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah, menyiapkan bahan penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan serta peningkatan ekonomi kerakyatan.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Sub Bidang Pembangunan Ekonomi Kerakyatan mempunyai fungsi :
  - Mengkaji, menelaah dan mensinkronkan naskah perencanaan di bidang kesejahteraan masyarakat.
  - Menelaah naskah rencana pembangunan bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat dari lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
  - Mengkaji dan menganalisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  - Melaksanakan kajian dan mendokumentasikan naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
  - Membagai tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
  - Menyampaikan laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang.
  - Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **3.3 Sub Bidang Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga**

- a) Sub Bidang Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah, menyiapkan bahan penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan serta pengembangan kepariwisataan, budaya, pemuda dan olahraga.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksd diatas, Kepala Sub Bidang Pengembangan Kepariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :
  - Mengkaji, menelaah dan mensinkronkan naskah perencanaan pembangunan bidang pengembangan kepariwisataan, budaya, pemuda dan olahraga.
  - Menelaah naskah rencana pembangunan bidang pengembangan kepariwisataan, budaya, pemuda dan olahraga dari lembaga pemerintah tingkat atas, untuk disinkronisasikan dengan rencana pembangunan daerah.
  - Mengkaji dan menganalisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan kepariwisataan, budaya, pemuda dan olahraga.
  - Melaksanakan kajian dan mendokumentasikan naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
  - Membagai tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.

- Menyampaikan laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang.
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### **4) Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur**

- a). Bidang Fisik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program di bidang perencanaan pembangunan fisik
  -
- b). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Fisik mempunyai fungsi :
  - Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang perencanaan pembangunan fisik.
  - Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang perencanaan pembangunan fisik.
  - Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang perencanaan pembangunan fisik.
  - Pengkoordinasian, fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan keistimewaan di bidang fisik.
  - Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang perencanaan pembangunan fisik, dan
  - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program di bidang perencanaan pembangunan fisik.

#### **4.1 Sub Bidang Penataan Keciaptakaryaan**

- a) Sub Bidang Penataan Keciaptakaryaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah data menyiapkan bahan penyusunan rencana dan kajian penataan keciaptakaryaan
- b) Dalam menjalankan tugas pokok tersebut diatas Sub Bidang Penataan Keciaptakaryaan mempunyai fungsi sebagai berikut :
  - Mengkaji, menelaah dan mensinkronkan naskah perencanaan pembangunan bidang penataan keciaptakaryaan.
  - Melaksanakan telaahan naskah pembangunan bidang penataan keciaptakaryaan.
  - Mengkaji dan menganalisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penataan Keciaptakaryaan.
  - Melaksanakan kajian dan mendokumentasikan naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
  - Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota.

#### **4.2 Sub Bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup**

- a) Sub Bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Bidang, mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah data menyiapkan bahan penyusunan rencana dan kajian Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan.

- b) Dalam menjalankan tugas pokok tersebut diatas Kepala Sub Bidang Penataan Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Mengkaji, menelaah, dan mensinkronkan naskah rencana pembangunan daerah di bidang pertanahan tata ruang dan lingkungan.
  - Mengkoordinasikan dan meyusun perencanaan pembangunan bidang pertanahan tata ruang dan lingkungan.
  - Mengkaji dan menganalisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penataan pertanahan, tata ruang dan lingkungan.
  - Melaksanakan telaahan naskah pembangunan bidang pertanahan tata ruang dan lingkungan.
  - Melaksanakan kajian dan mendokumentasikan naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan berikutnya.
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota sesuai tugas dan fungsinya.

#### **4.3 Sub Bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota**

- a) Sub Peningkatan Fungsi Utilitas Kota dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah data menyiapkan bahan penyusunan rencana dan kajian Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
- b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota mempunyai fungsi :
- Mengkaji, menelaah dan mensinkronkan naskah rencana pembangunan daerah di Bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
  - Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi lain di Bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
  - Mengkaji dan menganalisa data hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Peningkatan Fungsi Utilitas Kota.
  - Menyampaikan laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang.
  - Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Kota.

#### **5). Bidang Perencanaan Sosial Budaya**

- a). Bidang Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang perencanaan pembangunan sosial.
- b). Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, bidang sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang perencanaan pembangunan social.
  - Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang perencanaan pembangunan social.

- Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang perencanaan pembangunan social.
- Pengkoordinasian, fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan keistimewaan bidang social.
- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang perencanaan pembangunan social, dan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program di bidang perencanaan pembangunan sosial.

### **5.1 Sub Bidang Peningkatan Kualitas SDM dan Mental Spiritual**

- a) Sub Bidang Peningkatan Kualitas SDM dan Mental Spiritual dipimpin oleh kepala sub bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang, mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah, serta menyiapkan bahan penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan Mental Spritual.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat diatas sub bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Mental Spritual, Mempunyai Fungsi sebagai berikut :
  - Mengkaji, menganalisa dan mensinkronkan naskah perencanaan di Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Mental Spiritual.
  - Menelaah naskah Perencanaan Pembangunan bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Mental Spiritual, dari lembaga pemerintah tingkat atas untuk disinkronkan dan diselaraskan dengan rencana pembangunan di daerah.
  - Mengkaji dan menganalisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mental spiritual.
  - Melaksanakan kajian dan mendokumentasikan naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
  - Membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan member arahan sesuai dengan bidang tugasnya.
  - Menyampaikan laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
  - Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **5.2 Sub Bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas**

- a) Sub Bidang Peningkatan Kesehatan dan Keluarga Berkualitas, dipimpin oleh kepala sub bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang, mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah, serta menyiapkan bahan penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan bidang peningkatan kesehatan dan keluarga berkualitas.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat diatas sub bidang Peningkatan Kesehatan dan keluarga berkualitas, Mempunyai Fungsi :
  - Mengkaji, menganalisa dan mensinkronkan naskah perencanaan di Bidang Peningkatan Kesehatan dan keluarga berkualitas.



- Menelaah naskah Perencanaan Pembangunan bidang Peningkatan Kesehatan dan keluarga berkualitas, dari lembaga pemerintah tingkat atas untuk disinkronkan dan diselaraskan dengan rencana pembangunan di daerah.
- Mengkaji dan menelaah data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang peningkatan kesehatan dan keluarga berkualitas.
- Melaksanakan kajian dan mendokumentasikan naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
- Membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan member arahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Menyampaikan laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **5.3 Sub Bidang Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat**

- a) Sub Bidang Perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, dipimpin oleh kepala sub bidang, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang, mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengolah, serta menyiapkan bahan penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan bidang perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat diatas sub bidang Perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, mempunyai Fungsi :
  - Mengkaji, menelaah dan mensinkronkan naskah perencanaan di Bidang Perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
  - Menelaah naskah Perencanaan Pembangunan bidang Perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, dari lembaga pemerintah tingkat atas untuk disinkronkan dan diselaraskan dengan rencana pembangunan di daerah.
  - Mengkaji dan menganalisa data hasil dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
  - Melaksanakan kajian dan mendokumentasikan naskah hasil penelitian dan pengembangan potensi daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
  - Membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan member arahan sesuai dengan bidang tugasnya.
  - Menyampaikan laporan secara rutin dan berkala kepada kepala bidang.
  - Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **6). Bidang Penelitian dan Pengembangan**

- a). Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program bidang penelitian dan pengembangan.

- b). Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, bidang penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di bidang penelitian dan pengembangan.
  - Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang penelitian dan pengembangan.
  - Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program di bidang penelitian dan pengembangan.
  - Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program di bidang penelitian dan pengembangan, dan
  - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program di bidang penelitian dan pengembangan.

### **6.1 Sub Bidang Data dan Pengendalian Pembangunan**

- a) Sub Bidang Pengembangan Data dan Pengendalian Pembangunan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengumpulan data perencanaan pembangunan, pengembangan Data Pembangunan dan data statistik pembangunan daerah serta pengendalian pembangunan daerah.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pengembangan Data dan Pengendalian Pembangunan mempunyai fungsi :
- Melaksanakan pengumpulan data, pengolahan datapenyajian data, pengembangan data dan pengendalian pembangunan daerah.
  - Melaksanakan koordinasi program pembangunan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam lingkup penyelenggaraan data dan pengendalian pembangunan daerah.
  - Melaksanakan pengembangan data dan informasi serta data statistik pembangunan daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
  - Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah dan capaian hasil program dan kegiatan pembangunan daerah.
  - Membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
  - Menyampaikan laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala bidang.
  - Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **6.2 Sub Bidang Pengkajian dan Analisa Pembangunan**

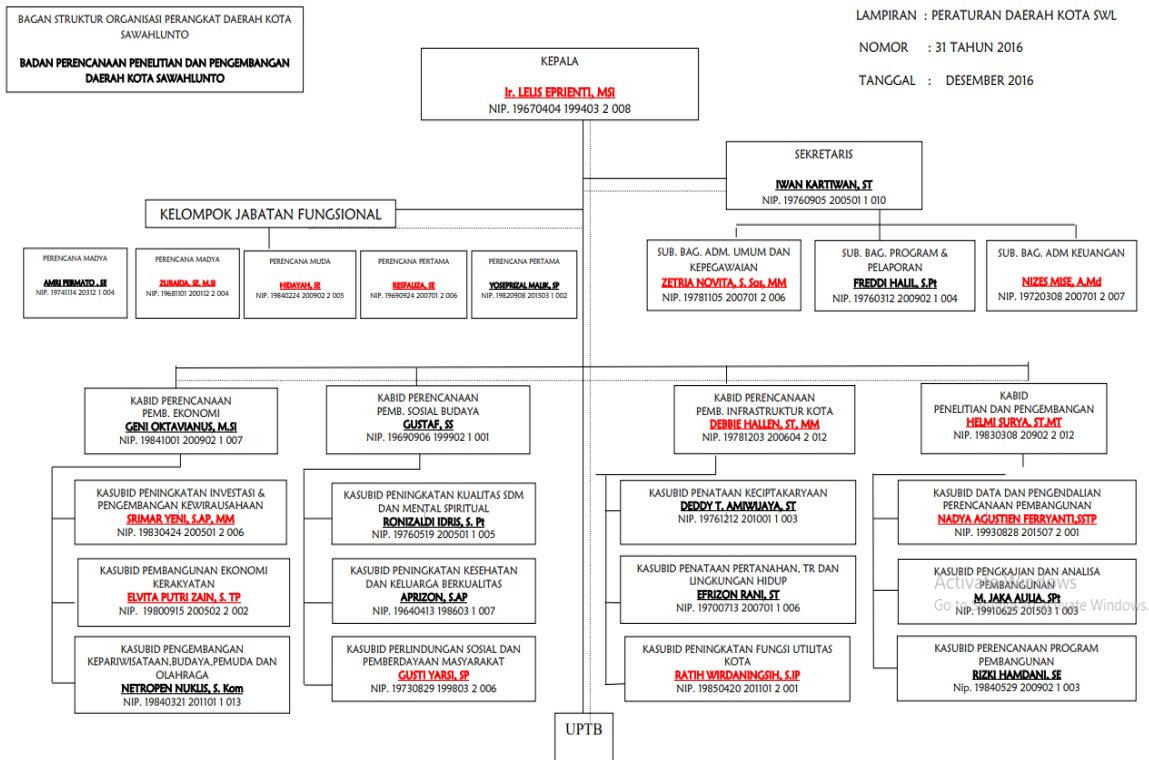
- a) Sub Bidang Pengkajian dan Analisa Pembangunan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian dan analisa potensi pembangunan daerah.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengkajian dan Analisa Pembangunan mempunyai fungsi :
- Melaksanakan pengkajian dan analisa pengembangan potensi strategis pembangunan daerah.

- Mengkoordinasikan program pembangunan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam lingkup pelaksanaan pengkajian dan analisa pengembangan pembangunan daerah.
- Mempublikasikan hasil penelitian dan analisa pembangunan dan mengkoordinasikan rencana tindak lanjutnya.
- Melaksanakan penelitian dan analisa potensi pembangunan daerah sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.
- Membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
- Menyampaikan laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang.
- Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **6.3 Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan**

- a) Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
- b) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Perencanaan Program Pembangunan mempunyai fungsi :
  - Menyelenggarakan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang daerah.
  - Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan OPD.
  - Menelaah, menganalisa dokumen perencanaan pembangunan provinsi dan nasional untuk disinkronkan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
  - Mengumpulkan dan menatausahakan naskah-naskah dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang daerah.
  - Membagi tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya.
  - Menyampaikan laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang.
  - Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## A. STRUKTUR ORGANISASI



## B. TATA KERJA

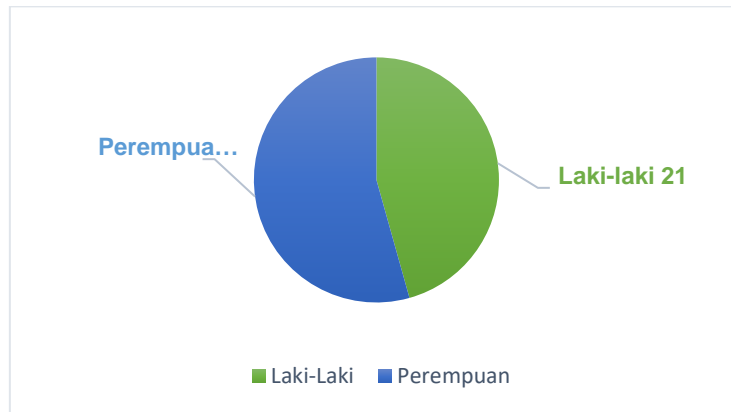
- Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal.
- Kepala Badan bertanggungjawab memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.
- Kepala Badan mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan.
- Setiap pegawai dilingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dalam menyampaikan laporan.
- Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

### 2.1 Sumber Daya Perangkat Daerah

#### A. Kondisi Kepegawaian

Jumlah ASN Barenlitbangda Kota Sawahlunto tercatat sebanyak 44 Orang. Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Golongan dan Pendidikan secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Gambar 1.4**  
**Komposisi Pegawai Barenlitbangda Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020**



Sumber : Barenlitbangda Kota Sawahlunto

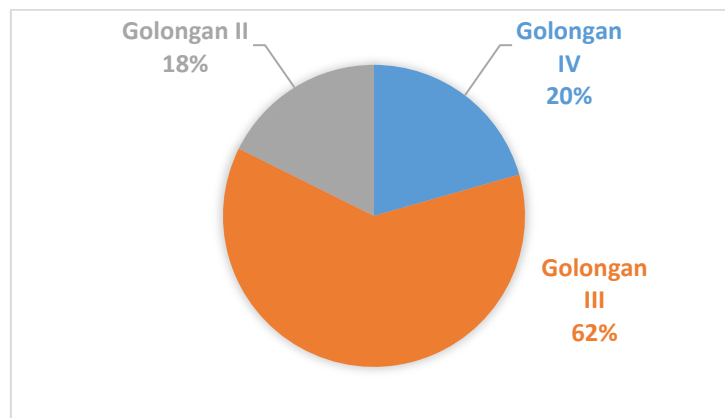
**Tabel I.1**  
**Rekapitulasi Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Kontrak Barenlitbangda Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021**

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
<b>A. Pejabat Struktur</b>			
Kepala (Eselon II/a)		1	1
Sekretaris (Eselon III/a)	1		1
Kepala Bidang (Eselon III/b)	1	3	4
Kepala Sub Bidang/ Sub Bagian (Eselon IV/a)	1	4	5
<b>B. Pejabat Fungsional Tertentu</b>			
Pejabat Fungsional Perencana Madya	1	1	2
Pejabat Fungsional Perencana Muda	6	4	10
Pejabat Fungsional Perencana Pertama	1	1	2
<b>C. Staf Fungsional Umum</b>			
Penata Muda Tk. I III/a		1	1
Pengatur II/d	1	1	2
Pengatur Muda Tk.I II/c	1	1	2
Pengatur Muda II/b	1	1	2
<b>D. Kontrak/Honor</b>	6	6	12
<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>44</b>

Sumber : Barenlitbangda Kota Sawahlunto

Apabila dikelompokkan berdasarkan golongan, maka kondisi Barenlitbangda Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

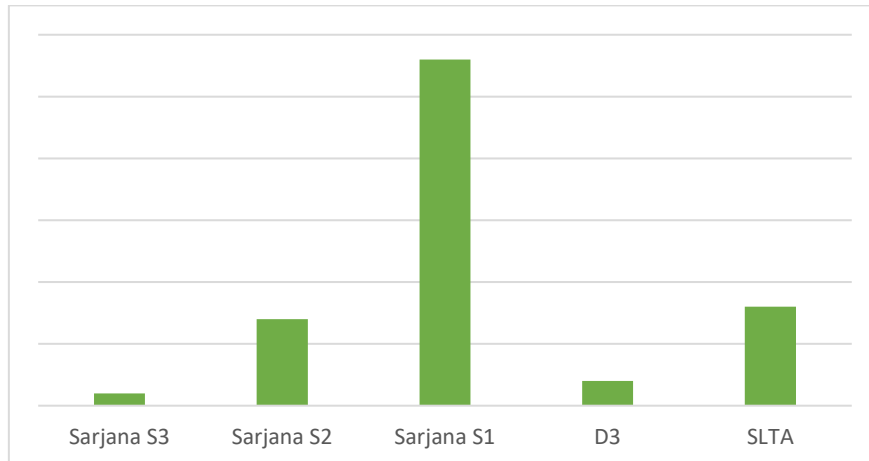
**Gambar 1.5 Komposisi Pegawai Barenlitbangda Kota Sawahlunto Berdasarkan Golongan Tahun 2021**



Sumber : Barenlitbangda Kota Sawahlunto

Sedangkan dilihat dari tingkat Pendidikan, maka kondisi kepegawaian pada Barenlitbangda Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Grafik I.I Komposisi Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dan Kontrak Barenlitbangda Kota Sawahlunto Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021**



Sumber : Barenlitbangda Kota Sawahlunto

Dari gambaran tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa kondisi ASN Barenlitbangda Kota Sawahlunto dengan kualifikasi pendidikan S3 sebanyak 1 Orang (2,17%), S2 sebanyak 7 Orang (15,22% ), S1 sebanyak 28 Orang (60,87% ), D3 sebanyak 2 Orang (4,35%) dan SLTA sebanyak 8 Orang (17,39%). Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki, secara kondisi personalia Barenlitbangda Kota Sawahlunto cukup memadai.

## A. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi saat ini masih menunjukkan belum terpenuhinya kebutuhan peralatan perkantoran yang memadai. Sejalan dengan tugas dan Fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja, dimana Sarana dan prasarana pendukung kegiatan Barenlitbangda Kota Sawahlunto adalah, kendaraan dinas operasional sebanyak 4 Unit serta jaringan area lokal yang dibangun oleh 1 unit *router*, 3 unit *switch* dan 1 unit *server*. Di dalam gedung kantor Barenlitbangda, terdapat ruang rapat berkapasitas 20 orang. Aset lainnya merupakan aset yang akan dihapuskan, tetapi masih tercatat di dalam Buku Inventaris Aset. Rincian aset dan unit usaha operasional yang mendukung kegiatan di Barenlitbangda Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2 Perlengkapan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2021**

NO	URAIAN	NILAI
1.	Peralatan dan mesin	2.271.608.620,57
2.	Aset tetap lainnya	236.659.650,00
3.	Aset lainnya	2.783.073.000,00

*Sumber : Laporan Barang Milik Daerah Barenlitbangda Kota Sawahlunto 31 Desember 2021*

## 2.3 KINERJA PELAYANAN BARENLITBANGDA KOTA SAWAHLUNTO

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Barenlitbangda Kota Sawahlunto merupakan Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, Barenlitbangda Kota Sawahlunto memiliki kewajiban dalam melaksanakan kinerja pelayanan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Realisasi dari kinerja pelayanan tersebut diantaranya terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

Pada dokumen Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Barenlitbangda di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan beserta target indikator kerjanya, dimana pencapaiannya dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran yang dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto. Tingkat ketercapaian kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis. Selanjutnya pada dokumen Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 sebelum perubahan telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Barenlitbangda beserta target indikator kerjanya. Kemudian pada dokumen Perubahan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 juga telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Barenlitbangda beserta target indikator kerjanya, dimana pencapaian kinerja pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto pada tahun 2018 - 2020 tersaji pada tabel berikut.





**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunthun 2018-2020**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN KE-									
					2018			2019			2020			
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	● <i>Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD</i>				100	100	100	100	100	100	100	100	91,9	92
2.	● <i>Persentase Keselarasan Renstra OPD dengan RPJMD</i>				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	● <i>Persentase Keselarasan Renja OPD dengan RKPD</i>				97	97	100	100	108	108	100	117,2	117	
4.	● <i>Persentase Keselarasan RPJMD dengan RTRW</i>				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	● <i>Nilai SAKIP/LKJIP</i>				B (61,03)	BB (72,83)	119	B (61,03)	BB (72,83)	119	B (61,03)	BB (72,83)	119	
6.	● <i>Presentasi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Aturan Perencanaan</i>				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	● <i>Presentase Kesesuaian antar APBD dengan RKPD</i>				70	80	114.3	70	75	107	80	85	106	
8.	● <i>Presentase Kegiatan Hasil Musrebang Desa/Kelurahan yang di Tuangkan Dalam APBD</i>				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH		TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN KE-								
						2018			2019			2020		
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9.	●	Presentase Kegiatan Usulan Musrembang Desa/Kelurahan yang di Tuangkan dalam APBD				50	50	100	70	65	93	70	70	100
10.	●	Presentase Kegiatan Fisik yang mempunyai Study Kelayakan Teknis				100	100	100	100	100	100	100	100	100
11.	●	Presentase Tingkat Kesesuaian Penataan Ruang Dengan rencana Tata Ruang				90	90	100	100	100	100	100	100	100
12.	●	Presentase Hasil Penelitian Yang di manfaatkan				10	10	100	15	15	100	20	20	100
13.	●	Presentase kegiatan yang dilaksanakan OPD yang sesuai SOP				50	50	100	70	70	100	80	80	100
14.	●	Presentase Item Data yang dapat dipertanggung Jawabkan				100	100	100	100	100	100	100	100	100
15.	●	Nota Kerjasama dengan Kab/Kota Lembaga Penelitian				5	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	●	Presentase Capaian Target Kinerja Program Kegiatan 100%				100-	74.27	74,27	100	81,8	81,8	100	89,77	89.77

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN KE-									
					2018			2019			2020			
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
17.	●	Persentase Kegiatan yang ada pada RKPD yang Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pengkajian				70	70	100	80	80	100	80	75	94-
18.	●	Persentase Partisipasi Publik terhadap Proses Perencanaan				100	100	100	100	100	100	100	100	100
19.	●	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang sesuai dengan sistematika				100	100	100	100	100	100	100	100	100
20.	●	Persentase Program dan Kegiatan RKPD dengan RPJMD, RPJMD dengan Renstra, Renstra dengan Renja di Bid .Ekonomi				100	100	100	100	100	100	100	100	100
21.	●	Persentase Program dan kegiatan RKPD dengan RPJMD, RPJMD dengan Renstra, Renstra dengan Renjadi Bid . Bidang Sosial Budaya				100	100	100	100	100	100	100	110,9	110,9

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH		TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN KE-								
						2018			2019			2020		
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.	●	Persentase Program dan Kegiatan RKPMD dengan RPJMD, RPJMD dengan Renstra, Renstra dengan Renja di Bid . Infrastruktur Kota				100	100	100	100	100	100	100	97,3	97,3
23.	●	Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan terhadap pemanfaatan Ruang				100	100	100	100	100	100	70	100	100
24.	●	Persentase Laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu dan sesuai aturan				70	70	100	80	75	93.75	80	75	93,75
25.	●	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana di Barenlitbangda				70	65	93	85	80	94.12	85	80	94,12
26.	●	Persentase ASN yang memiliki kompetensi di Barenlitbangda				50	45	90	50	45	90	50	45	90

Sumber : Barenlitbangda Kota 2018-2023

- IKU yang menjadi Indikator Tujuan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023
- IKK yang menjadi Indikator Tujuan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja pelayanan Barenlitbangda Kota sawahluntoTahun 2020 pada ***Terwujudnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan*** indikator sasarannya dokumen Perencanaan yaitu RPJPD, RPJMD, RTRW, RKPD, RENSTRA OPD dan Renja Perangkat Daerah. Kinerja Pelayanan Badan Penelitian Dan pengembangan Daerah. ***Terwujudnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan*** mencapai target yang telah direncanakan, ini berarti bahwa kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto sesuai dengan harapan. ***Terwujudnya OPD Perencana Pembangunan Daerah yang Berkualitas*** tercapai sebagaimana target yang direncanakan.

Kinerja pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2019-2021**

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke			Rata-Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan asli Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Daerah	8.149.313.950	5.332.607.082	6.490.462.143	7.072.528.725	4.842.620.443	6.019.310.328	86.81	90.81	92.74	6,657,461,058.33	5,978,153,165.33
Belanja Tidak Langsung	3.439.242.700	3.427.150.150	4.087.487.028	3.219.723.112	3.131.935.032	3.938.996.050	93.62	91.38	96.36	3,651,293,292.67	3,430,218,064.67
- Belanja Pegawai	3.439.242.700	3.427.150.150	4.087.487.028	3.219.723.112	3.131.935.032	3.938.996.050	93.62	91.38	96.36	3,651,293,292.67	3,430,218,064.67
Belanja Langsung	4.710.071.250	1.905.456.932	2.402.975.115	3.852.805.613	1.710.685.411	2.080.314.278	81.8	89.77	86.57	3,006,167,765.67	2,547,935,100.67
- Belanja Barang dan Jasa	4.319.141.340	1.905.456.932	2.230.564.565	3.471.161.878	1.710.685.411	1.912.444.778	80.39	89.78	85.73	743,521,521.67	1,207,710,063.00
- Belanja Modal	390.929.910	-	172.410.550	381.643.735	-	167.869.500	97.62	-	97.36	57,470,183.33	55,956,500.00
<b>Total</b>	<b>8.146.313.950</b>	<b>5.332.607.082</b>	<b>6.490.462.143</b>	<b>7.072.528.725</b>	<b>4.842.620.443</b>	<b>6.019.310.328</b>	<b>86.81</b>	<b>90.81</b>	<b>92.74</b>	<b>Rata – rata Serapan Anggaran 90.12</b>	

Sumber : Barenlitbangda Kota 2021-2023

Dilihat dari Tabel 2.2 di atas rata-rata pertumbuhan anggaran belanja Barenlitbangda Kota Sawahlunto mengalami pertumbuhan setiap tahunnya sebesar Rp. 6,656,461,058.33 sedangkan tingkat serapan rata-rata mengalami penurunan sebesar Rp. 5,978,153,165.33 setiap tahunnya. Dari angka ini terlihat bahwa sesungguhnya kebutuhan anggaran Barenlitbangda rata-rata setiap tahunnya hanya memerlukan kenaikan sebesar Rp. 678,307,893.00. Jika dibandingkan dengan realisasi capaian indikator kinerja sasaran (Tabel 2.1), dengan tingkat serapan anggaran rata-rata sebesar 90.12%, telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini mengisyaratkan bahwa ke depan Barenlitbangda agar lebih hati-hati dalam melakukan perencanaan sehingga anggaran tersebut dapat efektif dan efisien untuk dilaksanakan dan kelebihannya dapat dialokasikan ke sektor lain yang membutuhkannya.

#### **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BARENLITBANGDA KOTA SAWAHLUNTO**

Perubahan dalam pengelolaan pemerintahan daerah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak dalam proses perencanaan pembangunan di daerah, dimana urusan perencanaan sudah tidak lagi menjadi urusan wajib maupun pilihan, sehingga Barenlitbangda Kota Sawahlunto berubah menjadi Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Meskipun demikian, Barenlitbangda memiliki peran yang sangat penting, karena salah satu dari fungsi Barenlitbangda adalah perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota. Perumusan rencana strategis dimaksud dilakukan melalui perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang tepat untuk memastikan bahwa visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud selama periode kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut, untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal diperlukan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan masyarakat, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis dan kredibel. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Barenlitbangda harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan agar mencapai tujuan Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif. Tujuan dari Tata kelola pemerintahan yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel mampu mengembangkan sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi

Namun, pada periode berjalan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 ditemukan kendala-kendala dalam mewujudkan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kota Sawahlunto, selain itu juga adanya

perubahan Kebijakan Nasional dalam periode paruh waktu berupa perubahan nomenklatur, klasifikasi dan kodefikasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto dijabarkan lebih lengkap pada tabel analisis SWOT berikut :

**Tabel 2.3**  
**Analisis SWOT**

		<b>KEKUATAN (STRENGTH)</b>	<b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b>
<b>ISU STRATEGIS</b>		Ketersediaan Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan	Masih Kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya
		Struktur Organisasi dan Tupoksi Organisasi yang Jelas	Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan Struktural maupun Fungsional serta pelaksana dilingkungan Barenlitbangda.
		Adanya Dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA sebagai acuan dalam proses penyusunan perencanaan	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan belum optimal (Monev, koordinasi vertical dan horizontal, aplikasi) belum menjaga konsistensi, kontinuitas perencanaan dan penganggaran
		Konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan	Keterbatasan alat analisis yang membantu terciptanya argumentasi logis dalam mendukung koordinasi dan komunikasi lintas pemerintahan
		Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi (Ketersediaan data yang akurat dan valid)	Belum optimalnya pengolahan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistimatis dan akurat, teknologi informasi, komunikasi dan pengendalian perencanaan (Keterbatasan ketersediaan Data yang akurat dan valid)
		Penguatan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas	Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah
		<b>PELUANG (OPPORTUNITY)</b>	
Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan			
Akselurasi Penggunaan TIK secara optimal karena kondisi pandemic CIVID-19			
Pemendagri 86 Tahun 2017			
Penyerapan nomenklatur program, kegiatan berdasarkan arahan regulasi Pemerintah Pusat yang akan memudahkan proses monitoring dan evaluasi			



	Keterlibatan akademisi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan secara aktif		
ANCAMAN (THREAT)	Belum optimalnya sinergisitas perencanaan pembangunan baik pada tingkat nasional, propinsi dan daerah	STRATEGI S-T: Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis IT	STRATEGI W-T : Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah
	Masih kurangnya komitmen dan konsistensi OPD atas dokumen perencanaan pembangunan		
	Perubahan Peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan		
	Peningkatan jumlah penduduk dan pengangguran yang meningkat karena perlambatan aktivitas ekonomi yang membutuhkan kebijakan pembangunan perencanaan baik tingkat propinsi dan daerah		
	Kondisi pandemic COVID-19 yang mengharuskan penataan kembali sistim kerja supaya efektif (WFH)		
	Keterbatasan penerima daerah akibat perlambatan aktifitas ekonomi karena pandemic Covid-19		

Sumber: Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2020

Dalam rangka melaksanakan pelayanan di Barelitbangda masih terdapat beberapa hambatan dan ancaman yang perlu diselesaikan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang. Baik hambatan ataupun ancaman optimis dapat diatasi karena adanya dukungan serta komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan. Beberapa hambatan diantaranya adalah masih terjadi keterbatasan kompetensi SDM perencana di Barenlitbangda, kompetensi perencana ini perlu ditingkatkan melalui pendidikan formal, diklat, *Inhouse Training*, forum diskusi serta keikutsertaan dalam seminar baik nasional ataupun internasional. Hambatan ini dapat terbantu oleh ketersediaan alokasi anggaran untuk kegiatan pengembangan kompetensi pegawai.

Struktur Organisasi dan Tupoksi yang jelas di dukung oleh standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan Struktural maupun Fungsional serta pelaksana dilingkungan Barenlitbangda. Keterbatasan ketersediaan data yang akurat dan valid dan keterbatasan alat analisis dapat dibantu oleh tersedianya sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi

Adanya Dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA dan RENJA sebagai acuan dalam proses penyusunan perencanaan, sehingga sinkronisasi Perencanaan Pembangunan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan dan implementasi program dan koordinasi, sinkronisasi komunikasi verbal dan herizontal dalam rangka penyusunan perencanaan, sehingga aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Barenlitbangda maupun Dinas Teknis yang terkait terintegrasi konsistensi,

kontinuitas perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran.

Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah, dapat dibenahi dengan adanya penyeragaman nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan arahan regulasi pemerintah pusat, sehingga dapat memudahkan proses monitoring dan evaluasi.

Selain hambatan, terdapat pula ancaman dari luar organisasi yaitu :

Kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan berlakunya bekerja dari rumah (WFH) dan bekerja di kantor (WFO), sehingga perlu ditata kembali sistem kerjanya agar efektivitas kerja tidak menurun. Selain itu penerimaan daerah menjadi berkurang akibat perlambatan aktivitas ekonomi, mempengaruhi penganggaran dan pelaksanaan kegiatan di Barenlitbangda. Hal ini dapat dibantu dengan akselerasi penggunaan TIK seperti melakukan rapat secara virtual, tanda tangan secara digital dan komunikasi pelaksanaan pekerjaan dengan menggunakan aplikasi. Keterbatasan anggaran menyebabkan perlunya melakukan prioritas dan melakukan kegiatan dengan efektif dan efisien.

Kondisi eksternal yang terjadi pada saat ini adalah meningkatnya jumlah penduduk dan jumlah pengangguran karena perlambatan aktivitas ekonomi perlu kebijakan perencanaan pembangunan yang lebih presisi. Hal ini perlu perhatian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan secara aktif dengan melibatkan pihak-pihak (Akademisi) yang mampu untuk merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan.

Hambatan lain adalah belum sinergisnya perencanaan pembangunan baik pada tingkat daerah dan nasional serta perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan perlu untuk diatasi dengan berbagai aktivitas koordinasi baik dengan pusat, provinsi maupun dengan kabupaten/kota.



## BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BARENLITBANGDA KOTA SAWAHLUNTO

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Barenlitbangda Kota Sawahlunto bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perencanaan yang mengemban urusan penunjang pemerintahan. Barenlitbangda Kota Sawahlunto merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kota Sawahlunto yang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Barenlitbangda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta menyelenggarakan tiga fungsi utama yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Barenlitbangda Kota Sawahlunto diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel yang memerlukan dukungan dari berbagai unsur pembangunan. Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Barenlitbangda yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Permasalahan dalam pelaksanaan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Barenlitbangda dijabarkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Barenitbangda Kota Sawahlunto**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya peyelenggaraan pemerintah yang bersih dan akuntabel	Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan	Masih terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan teknis di bidang Perencanaan Kurang memadainya data dan informasi pendukung dalam menyusun dokumen perencanaan Masih kurangnya komitmen dalam menyusun dokumen perencanaan Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data analisis pembangunan, serta teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan daerah Kesesuaian dan sinergisitas dokumen perencanaan belum optimal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah
		Belum optimalnya fungsi kelitbangan dalam pembangunan	Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum berjalan baik
			Belum adanya kerjasama pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar pemangku kepentingan (Dewan Riset Daerah).
			Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) belum optimal
			Belum optimalnya koordinasi perencanaan yang efektif pada Bidang ekonomi, Sosial Budaya dan infrastruktur
2	Peningkatan Kapasitas kelembagaan belum optimal	Belum optimalnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang perencanaan	Keterbatasan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran, kecepatan, dan ketepatan penyelesaian pekerjaan
			Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) belum memadai
			Lemahnya koordinasi perencanaan internal dan antar perangkat daerah
			Belum tersedianya SOP Perencanaan

#### 2.4 TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Telaahan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam hal ini visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto, ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto tersebut.

Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto tertuang dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 yang kemudian dilakukan perubahan pada tahun 2020. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode keempat RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025, dimana tema pembangunan periode keempat ini menjadi salah satu rujukan kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Visi

pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 berdasarkan visi Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto terpilih adalah sebagai berikut :

**“DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA”**

Untuk lebih jelasnya makna atas kata-kata pilihan dalam visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**KEBERSAMAAN** dalam visi tersebut adalah, menghadirkan semangat kebersamaan dalam membangun kota disegala bidang terutama kebersamaan antara kekuatan politik, pemerintah, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai dan bundo kanduang. Karena dengan kebersamaan ini Insya Allah segala potensi yang ada dapat dimanfaatkan untuk membangun Kota Sawahlunto yang lebih maju.

**KOTA WISATA** adalah mewujudkan visi Kota Sawahlunto sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 yaitu “ SAWAHLUNTO TAHUN 2020 MENJADI KOTA WISATA TAMBANG YANG BERBUDAYA ” serta mengkaji kemungkinan terbaik yang perlu dilakukan sehingga arah pembangunan kota sesuai dengan VISI yang sudah disepakati seluruh *stakeholders* kota.

**KREATIF** maksudnya pariwisata adalah persaingan pasar yang kompetitif dan dinamis atau berubah setiap waktu, kalau tidak ada wahana yang baru atau kreasi baru yang menarik, orang tidak akan berkunjung untuk kedua kalinya ke Kota Sawahlunto. Untuk itu diperlukan kreatifitas dalam pelaksanaan pembangunan terutama pengelolaan kepariwisataan di Kota Sawahlunto.

**INOVATIF** maksudnya dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju Kota Wisata tambang yang berbudaya, selain kreatifitas, juga dibutuhkan inovasi-inovasi baik dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah, maupun pengembangan kualitas produk daerah. Pada visi ini, inovasi ditekankan pada pengembangan dari produk Sawahlunto, baik itu penyelenggaraan pelayanan pemerintah, pertanian, industri, pariwisata dan lainnya.

**UNGGUL** maksudnya seluruh aktifitas yang dibuat atau dilakukan diseluruh bidang harus mempunyai keunggulan tertentu, harus mempunyai nilai lebih dari daerah lain, baik di bidang pariwisata, pendidikan, kesehatan, agama, adat istiadat, infrastruktur, ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

**BERMARTABAT** maksudnya terciptanya kebersamaan dan kerukunan serta gotong-royong dalam kehidupan masyarakat, memiliki daya saing, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur berkepribadian, demokratis, rasional dan berkeadilan, meningkatkan kualitas beragama untuk membentuk kepribadian, watak akhlak dan tingkah laku yang sesuai dengan budaya lokal, serta membentengi generasi muda akan pengaruh dari budaya asing.

**BERKEADILAN** maksudnya pembangunan tidak boleh bertumpu pada satu kecamatan atau daerah tertentu saja, harus merata sesuai dengan potensi yang ada. Pendistribusian kegiatan dan hasil pembangunan harus merata. Menghilangkan kesenjangan antar wilayah dan kecamatan, menghilangkan diskriminasi dan berbagai bentuk ketidakadilan yang ada ditengah-tengah masyarakat.

**SEJAHTERA** maksudnya, masyarakat Kota Sawahlunto terpenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan dan papan. Memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak terutama untuk anak disabilitas, warga kurang mampu dan lansia, terbukanya kesempatan kerja dengan penghasilan yang memadai dan hasil pembangunan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Sawahlunto.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, ditetapkan misi pembangunan jangka menengah Kota Sawahlunto dimana misi merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan VISI. Untuk mewujudkan visi diatas, akan dicapai melalui beberapa misi yaitu :

1. Menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui BLK.
3. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing (dengan memberikan beasiswa atau Kartu Sawahlunto Pintar) .
4. Menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif .
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat .
6. Mengembangkan potensi wisata secara serius dan berkelanjutan .
7. Tersedianya infrastruktur publik yang merata dan memadai .
8. Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya .
9. Mewujudkan kota berbasis *smart city* dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan daya tarik investor.

Secara lengkap kontribusi Barenlitbangda dalam mendukung pencapaian visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto tersaji pada gambar sebagai berikut :

**Gambar 3.1 Kontribusi Barenlitbangda dalam Mendukung Pencapaian Visi – Misi Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018-2023**



**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat**  
**Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi: Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif Inovatif, Unggul, Bermayabat, Berkeadilan Dan Sejahtera					
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	TUPOKSI	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan Yang baik, Bersih Dan Inovatif	Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan	Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan	Belum optimalnya Kualitas Penunjang Urusan pemerintahan Bidang perencanaan	Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan
		Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan	Belum optimalnya fungsi kelitbangan dalam pembangunan	Keterbatasan alat analisis yang membantu terciptanya argumentasi logis dalam mendukung koordinasi dan komunikasi lintas pemerintahan	Keterlibatan akademisi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan secara aktif
		Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan	Belum optimalnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang perencanaan	Belum optimalnya pengolahan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistimatis dan akurat, teknologi informasi, komunikasi dan pengendalian perencanaan (Keterbatasan ketersediaan Data yang akurat dan valid)	Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi (Ketersediaan data yang akurat dan valid)
		Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan Fungsinya		Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah	Konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan
		Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan			Ketersediaan Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan
		Pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan			



### 3.2 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA DAN RENSTRA PROPINSI

#### a. *Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas Tahun 2015-2019*

Visi Kementerian PPN / Bappenas 2015-2019 yaitu **“Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”**. Tugas pokok dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas adalah melakukan penyusunan perencanaan pembangunan, tertuang di dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019. Adapun telaahan keterkaitan sasaran Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019 adalah :

1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergi dan kredibel, serta
2. manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/ Bappenas yang baik dan bersih.

Sasaran tersebut diimplementasikan di dalam arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan yang relevan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Sasaran Kementerian PPN/Bappenas juga tidak bisa dipisahkan dengan sasaran dari agenda Nawacita presiden terpilih, di mana arah kebijakan dan strategi Kementerian PPN/Bappenas pada dasarnya adalah untuk mendukung agenda tersebut dalam lingkup perencanaan pembangunan tingkat nasional, di antaranya :

- a. peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan negara, kerja sama pembangunan internasional, aparatur negara, politik, komunikasi, pengembangan wilayah, otonomi daerah, hukum, regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sarana prasarana, makro ekonomi, stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
- b. penyusunan rencana pembangunan di bidang politik, hukum, komunikasi, pertahanan, keamanan, kerjasama pembangunan internasional, aparatur negara, politik, komunikasi, pengembangan wilayah, pembangunan daerah tertinggal, perbatasan negara, rawan bencana, perkotaan, perdesaan, hukum, strategi nasional reformasi regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, integrasi antara pusat dan daerah diantaranya penyiapan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, kota baru, insentif ketenagakerjaan, makro ekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang terkait.

Sementara itu, ada beberapa arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional yang bertujuan untuk 1) meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan, 2) memperkuat proses perencanaan secara *evidence-based*, 3) memperkuat kapasitas SDM dalam ranah perencanaan dan penganggaran, 4) memetakan kapasitas SDM untuk mengarahkan jenjang karir dan opsi pengembangan akademis untuk mencapai tujuan Kementerian PPN/Bappenas, 5) memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, 6) memperkuat sistem data dan informasi, 7) meminimalisasi deviasi perencanaan dan penganggaran, 8) sinkronisasi kerangka regulasi dan kelembagaan, 9) mendorong perubahan pola pikir dan budaya, dan 10) peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pusat dan daerah.

Dalam hal meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan, kebijakan dan strategi diarahkan untuk 1) meningkatkan kualitas bisnis sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian; 2) mengembangkan sistem hasil pemantauan dan evaluasi; 3) mengembangkan sistem data dan informasi; 4) meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan *tools* atau *instrument*; 5) meningkatkan sosialisasi *tools* dan *instrument* terhadap pelaku pembangunan lain; 6) memperkuat sinkronisasi sistem penyusunan RKP dan Renja K/L; dan 7) memperkuat koordinasi antar unsur di daerah.

Dalam berbagai implementasi visi dan misi, kebijakan Bappenas yang terkait dengan daerah diarahkan untuk 1) membangun hubungan yang efektif; 2) memperkuat koordinasi dalam keseluruhan proses perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian; 3) sinkronisasi pembangunan lintas wilayah; 4) sinkronisasi sistem data dan informasi antar wilayah; 5) analisis kerangka regulasi dan kelembagaan antar wilayah; 6) peningkatan kapasitas kelembagaan perencana melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan penyusunan perencanaan daerah; 7) meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan *tools* atau *instrument* pemantauan dan evaluasi daerah; dan 8) meningkatkan sosialisasi *tools* atau *instrument* pemantauan dan evaluasi daerah. Arah kebijakan ini menjadi bahan acuan bagi Bappeda provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan arah kebijakan maupun dalam menentukan skala prioritas pada setiap program dan kegiatan pembangunan.

#### *b. Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021*

Selanjutnya secara umum, telah ada keselarasan antarsasaran dari instansi pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Lebih lanjut sasaran tersebut dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target setiap tahunnya.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan pembangunan, visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Adapun visi Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Makna yang terkandung dalam misi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

##### 1. Profesional

Kondisi kerja yang di dukung oleh SDM dengan kapasitas dan kopetensi yang berkualitas dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan guna mendukung capaian pembangunan daerah serta berkontribusi dalam pembangunan nasional, sehingga kineja yang dilakukan dapat terukur dan di pertanggung jawabkan.

##### 2. Inovatif

Dalam rangka menghasilkan produk-produk perencanaan pembangunan yang baru, dilakukan melalui upaya pendayagunaan pemikiran dan kemampuan imajinasi yang orisinil serta di luar bingkai konservatif (*out of the box*) dengan memperhatikan koridor peraturan perundangan yang berlaku.

### 3. Akuntabilitas

Perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban ini meliputi input, proses yang dilakukan serta output yang dihasilkan.

Guna mewujudkan visi Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 di atas, maka dirumuskan 5 misi yang merupakan penjabaran operasional dari visi tersebut, yaitu :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradab dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi .
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan daerah; Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Renstra Bappeda Sumatera Barat menyebutkan bahwa sasaran dalam mewujudkan pembangunan tersebut adalah :

1. Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat.
2. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, dan
3. Tersedianya data statistik yang akuntabel (up to date, valid dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan.

**Tabel 3.3**  
**Permasalahan Pelayanan Barenlitbangda Kota Sawahlunto Berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda Propinsi Sumatera Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Propinsi	TUPOKSI	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<p>Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan</p> <p>Terwujudnya pelayanan prima dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik</p> <p>Meningkatkan tata kelola organisasi</p>	<p>Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan</p> <p>Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan</p> <p>Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan</p> <p>Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan Fungsinya</p> <p>Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan</p> <p>Pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan</p>	<p>Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan</p> <p>Belum optimalnya fungsi kelitbangan dalam pembangunan</p> <p>Belum optimalnya Kualitas Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang perencanaan</p>	<p>Belum optimalnya Kualitas Penunjang Urusan pemerintahan Bidang perencanaan</p> <p>Keterbatasan alat analisis yang membantu terciptanya argumentasi logis dalam mendukung koordinasi dan komunikasi lintas pemerintahan</p> <p>Belum optimalnya pengolahan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistimatis dan akurat, teknologi informasi, komunikasi dan pengendalian perencanaan (Keterbatasan ketersediaan Data yang akurat dan valid)</p> <p>Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya menjadi rujukan perencanaan pembangunan daerah</p>	<p>Komitmen pimpinan untuk meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan</p> <p>Keterlibatan akademisi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan secara aktif</p> <p>Peningkatan Penerapan Sistem Informasi dan Teknologi di Organisasi (Ketersediaan data yang akurat dan valid)</p> <p>Konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan</p> <p>Ketersediaan Alokasi Anggaran untuk Pelaksanaan Program/Kegiatan</p>

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) merupakan aktivitas utama Barenlitbangda Kota Sawahlunto. Peraturan perundang-undangan mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (a spasial) wajib melakukan sinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang bersifat spasial. Tugas Barenlitbangda dalam menjaga keselarasan perencanaan menjadi kunci utama sinergitas perencanaan pembangunan baik yang bersifat spasial maupun aspasial. Perencanaan pembangunan merupakan tahapan perwujudan RTRW yang memiliki fungsi matra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sehingga tidak terlepas dari konteks penataan ruang yang secara komprehensif mengintegrasikan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar tingkat kewenangan, yang diperkuat dengan muatan daya dukung lingkungan, informasi kawasan rawan bencana dan arahan zonasi dalam pengembangan/ pembangunan kawasan.

Tujuan Penataan Ruang Kota Sawahlunto adalah menghasilkan suatu wujud keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor yang ada dalam ruang dimana RTRW akan menjadi pedoman dalam pembangunan wilayah yang sudah dilegalkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012. Sasaran Penataan Ruang meliputi :

- a. Tercapainya ruang untuk kawasan lindung seluas 45% dari wilayah Kota Sawahlunto dan tersedianya ruang untuk ketahanan pangan.
- b. Terwujudnya ruang investasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
- c. Terwujudnya ruang untuk kawasan perkotaan dan perdesaan dalam sistem wilayah yang terintegrasi, dan
- d. Terlaksananya prinsip mitigasi bencana dalam penataan ruang.

Kebijakan dan Strategi penataan ruang sebagai tindak lanjut dari tujuan dan sasaran tersebut meliputi kebijakan dan strategi pengembangan wilayah, kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang, kebijakan dan strategi pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu RTRW memiliki muatan arahan pemanfaatan ruang berupa indikasi program utama, yang dirumuskan dalam mewujudkan sasaran penataan ruang. Indikasi program utama tersebut dihasilkan dari berbagai forum koordinasi, dialog dan proses asistensi dengan berbagai pemangku kepentingan terutama perangkat daerah Desa/Kelurahan dan Kota. Indikasi program memuat kepentingan sektor pembangunan di Sawahlunto, sehingga indikasi program seharusnya ditindaklanjuti oleh perangkat daerah agar tujuan penataan ruang dan pembangunan di Sawahluntot terwujud.

Perubahan RPJMD Kota sawahlunto Tahun 2018-2032 telah mencantumkan rumusan keterkaitan Rencana Pembangunan dengan Kebijakan Kewilayahan dalam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, bahwa RTRW dapat dilakukan peninjauan kembali 1 kali dalam 5 tahun. Peninjauan kembali tidak diartikan untuk melakukan pemutihan penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, kegiatan peninjauan kembali harus secara utuh melihat keseluruhan kinerja penataan ruang

dan menghasilkan substansi RTRW, namun tidak menyusun rencana yang baru. Peninjauan kembali ini merupakan bagian dari proses perencanaan tata ruang, sebagai proses untuk memperbaiki rencana tata ruang yang ada, bukan berarti penyusunan yang baru secara totalitas. Kota Sawahlunto pada tahun Anggaran 2017, telah melaksanakan Peninjauan kembali RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032. Hasil dari kegiatan Peninjauan kembali RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032 menyatakan bahwa RTRW Kota Sawahlunto 2012-2032 memerlukan beberapa revisi untuk beberapa aspek perencanaan, diantaranya :

1. Kebijakan dan isu eksternal dan internal yang berkembang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan perlu diakomodir dalam rencana tata ruang Kota Sawahlunto.
2. Belum terealisasikannya rencana dan program yang telah direncanakan untuk 5 tahun pertama, sehingga perlu adanya penyesuaian kembali arahan dan tahapan pelaksanaannya.
3. Perlu penyesuaian rencana yang ada dengan kondisi di lapangan dan data dan peta terbaru.
4. Update peta dasar Kota Sawahlunto sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.
5. Adanya perubahan batas wilayah, sehingga peta pada dokumen rencana perlu disesuaikan.

Selain itu untuk pelaksanaan Undang–Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bahwa Pemerintah daerah dalam penyusunan RTRW wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program.

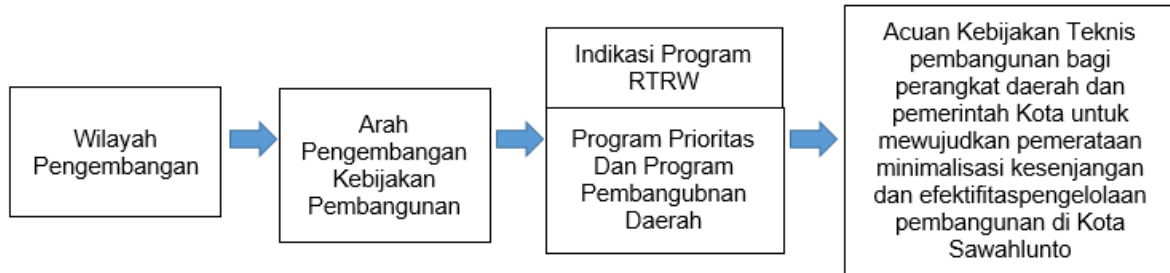
Proses revisi RTRW Kota Sawahlunto pada tahun 2020 mengalami penundaan dikarenakan situasi wabah Covid-19. Pada tahun ini direncanakan penyusunan KLHS sebagai pelengkap revisi RTRW Kota Sawahlunto, namun kegiatan ini belum bisa terlaksana karena permasalahan batas wilayah antara Kota Sawahlunto dengan Kabupaten Sijunjung yang belum keluar Permendagrinya, sehingga untuk tahun ini progres atas kegiatan penyusunan revisi RTRW Kota Sawahlunto hanya sampai pada penyusunan dokumen KLHS. Berkembangnya kegiatan perekonomian dan aktifitas perkotaan mengharuskan adanya upaya pengaturan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota yang cukup ekstra. Adapun beberapa persoalan perkembangan pemanfaatan ruang kota yang perlu ditangani yaitu persoalan transportasi, kesesuaian penggunaan lahan, pengendalian bangunan, PKL serta persoalan perkotaan lainnya. Dinamika pembangunan perkotaan perlu diantisipasi melalui penyiapan kebijakan tata ruang yang komprehensif dan sesuai perkembangan kota. Rencana tata ruang harus dapat memberikan arahan yang jelas dan tegas terhadap setiap pemanfaatan ruang di Kota Sawahlunto. Tujuan penataan ruang wilayah kota merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kota yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan penataan ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan :

1. Visi dan misi pembangunan wilayah kota;
2. Karakteristik wilayah kota; dan
3. Isu strategis dan kondisi objektif yang diinginkan

Berdasarkan hasil analisis, Core Bussiness Kota Sawahlunto adalah ;

1. Pengembangan Pariwisata berbasis budaya, tambang, dan rekreasi.
2. Pertambangan.
3. Perkebunan rakyat yang akan dikembangkan menjadi Agrobisnis.
4. Kegiatan Industri kecil dan kerajinan.

**Gambar 3.1 Kerangka Pikir Perumusan Arah Kebijakan**



**Sumber: Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023**

Keterkaitan program RPJMD dengan indikasi program RTRW dicantumkan dalam matrik arah kebijakan kewilayahan yang terbagi dalam 4 Wilayah Pengembangan (WP) yang masing-masing ditentukan berdasarkan tema, fokus dan arah pengembangan. Setiap arah pengembangan dicantumkan rincian indikasi programnya dan dikaitkan dengan Prioritas Pembangunan dalam RPJMD, ditentukan nomenklatur program/ kegiatan sesuai pemutakhiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan ditentukan. Perumusan Arah kebijakan kewilayahan tersebut menunjukkan bahwa indikasi program RTRW dapat dilaksanakan dalam program-program yang tercantum dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

Arah kebijakan kewilayahan tersebut menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai sektor unggulan dan fokus pengembangan. Substansi tersebut dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dapat menentukan program dan kegiatan serta lokasi yang ditangani pada sektornya masing-masing hingga tahun 2023. Idealnya arahan kebijakan kewilayahan yang dirumuskan Barenlitbangda Kota Sawahlunto dalam Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 menjadi pedoman bidang-bidang perencana Barenlitbangda dalam menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan yang seharusnya disusun oleh setiap pemegang sektor di seluruh bidang Barenlitbangda dalam melaksanakan perencanaan pembangunan lingkup bidangnya masing-masing. Barenlitbangda perlu menyusun pedoman berupa matrik sinkronisasi program kebijakan yang terkait dengan lingkup sektor yang ditanganinya sebagai panduan setiap Sub Bidang/Bidang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

**Tabel 3.4**  
**Telaahan RTRW dan KLHS terkait Barenlitbangda Kota Sawahlunto**

No	Kajian RTRW.KLHS	TUPOKSI	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Implikasi RTRW	Koordinasi sebagai perencanaan dalam pentataan kota dan wilayah	Tidak terdapat permasalahan karena Barenlitbangda merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang tidak secara langsung bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan konkuren, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak	RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan	Barenlitbangda selaku sekretariat BKPRD mempunyai kewenangan dalam mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pembentukan BKPRD, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Implikasi KLHS	Memfasilitasi dalam kelompok kerja penyusunan dokumen KLHS	Tidak terdapat program kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan	Kapasitas SDM yang memahami KLHS dan regulasi KLHS terbatas	Peraturan yang mewajibkan penyusunan KLHS untuk setiap dokumen perencanaan
			Adanya perubahan Kebijakan Rencana Program (KRP)	Kajian lingkungan hidup dalam RTRW baru sampai muatan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup KLHS



### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun pada Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, terdapat 9 isu strategis. Dari kesembilan isu strategis tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi Barenlitbangda adalah isu strategis keenam, yaitu "**Profesionalisme Birokrasi Pemerintahan**", dimana prioritas utama Kota Sawahlunto dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kota Sawahlunto dilakukan melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan **peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik** melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas data.

Selanjutnya berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan yang dihadapi Barenlitbangda, telaahan terhadap tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Barenlitbangda, telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan terhadap RTRW dan KLHS serta telaahan terhadap isu strategis Kota Sawahlunto dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto sebagai lembaga teknis yang bertugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Rumusan isu strategis pada Perubahan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas SDM.
2. Penguatan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas
3. Penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil-hasil kajian Teknokratik.
4. Perencanaan pembangunan daerah berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan ketersediaan *database* secara digital dalam penyusunan perencanaan, pengolahan data dan informasi berbasis informatika.
6. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
7. Penyusunan strategi penanganan dan pemulihan dampak COVID-19 di lingkup Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Barenlitbangda Kota Sawahlunto merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto. Oleh karena itu perumusan tujuan dan sasaran Barenlitbangda Kota Sawahlunto harus sejalan dengan pencapaian visi - misi Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Sawahlunto. Pada Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 sebelum perubahan telah ditetapkan tujuan utama Barenlitbangda Kota Sawahlunto, yaitu mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Untuk mencapai tujuan utama tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan yaitu Tersedianya perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Seiring diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14); Kota Sawahlunto serta adanya perkembangan situasi dan kondisi, kemudian mendasari dilakukannya perubahan terhadap RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 sebagaimana Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Hal ini kemudian berimplikasi pada perubahan tujuan dan sasaran pembangunan serta sebagian komponen pendukungnya, sehingga perlu diikuti dengan melakukan perubahan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto. Berkaitan hal tersebut maka dipandang perlu untuk melakukan perumusan kembali tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan sebagai tujuan dan sasaran Barenlitbangda Kota Sawahlunto pada Perubahan Renstra serta Perubahan Renstra untuk periode Tahun 2018-2023.

Perumusan tujuan dan sasaran Barenlitbangda Kota Sawahlunto dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023, agar dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto. Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

**Tabel 4.1**  
**Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah Badan Perencanaan**  
**Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2018-2023 (Sebelum Perubahan)**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TUJUAN TAHUN KE-								
				2018			2019			2020		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Tersedianya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas		Peringkat Nilai LPPD Tingkat Propinsi	Peringkat	3	7	20	2	11	11,1	1	7	16,7
	Terwujudnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah, Tahunan	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	100	91,9	92
		Persentase Keselarasan Renstra OPD dengan RPJMD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Keselarasan Renja OPD dengan RPJMD	%	97	97	100	100	108	108	108	117,2	117
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RTRW	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Terwujudnya OPD Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Nilai LKjIP Barenlitbangda	Skor Nilai	B (61,03)	BB (72,83)	119	B (61,03)	BB (72,83)	119	B (61,03)	BB (72,83)	119

**Tabel 4.2**  
**Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah Pelayanan Badan Perencanaan**  
**Penelitian dan Pengembangan Daerah tahun 2021-2023 (Setelah Perubahan)**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET TAHUN			KONDISI AKHIR RENSTRA
				2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel		<b>Nilai SAKIP</b>	Nilai	B (6475)	B (68.22)	BB (72.83)	BB (72.83)
	Meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan Daerah	<b>Indeks Kualitas Perencanaan (Peringkat PPD tingkat Provinsi (IKU))</b>	Peringkat	3	3	2	2
		<b>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan (IKU)</b>	%	100	100	100	100
		● <i>Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)</i>	%	100	100	100	100
		● <i>Persentase Konsistensi Program RPJMD, Bid. Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) kedalam RKPD (%)</i>	%	100	100	100	100
		● <i>Persentase Konsistensi Program RPJMD, Bid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPD (%)</i>	%	100	100	100	100
		● <i>Persentase Konsistensi Program RPJMD, Bid. Infrastruktur dan Wilayah kedalam RKPD (%)</i>	%	100	100	100	100
		● <i>Jumlah Proposal Inovasi Daerah yang terevaluasi dan diterapkan (Proposal)</i>	Jumlah				
		● <i>Presentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras</i>	%	100	100	100	100
		● <i>Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan</i>	%	28.3	29	30	30

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Persentase kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang</i></li> </ul>	%	100	100	100	100
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Persentase hasil penelitian yang ditindak lanjuti stakeholder</i></li> </ul>	%	100	100	100	100
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Indeks Inovasi Daerah</i></li> </ul>		Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Pada perubahan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto 2018 – 2023 terjadi perubahan tujuan dan sasaran. Dalam menghitung kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja dihitung dengan formula sebagai berikut :

### **Defenisi Operasional**

Dalam menghitung kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja dihitung dengan formula sebagai berikut :

<b>Indeks Kualitas Perencanaan (Peringkat PPD tingkat Provinsi (IKU))</b>	Peringkat PPD tingkat Provinsi	
<b>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan (IKU)</b>	<i>(Jumlah Program di RKPD dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama/Jumlah Program di RPJMD</i>	X 100%
● <i>Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (%)</i>	<i>(Jumlah Program di RKPD dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama/Jumlah Program di RPJMD</i>	X 100%
● <i>Persentase Konsistensi Program RPJMD Bid. Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) kedalam RKPD (%)</i>	<i>(Jumlah Program di RKPD Bidang Perekonomian dan SDA dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama/Jumlah Program di RPJMD</i>	X 100%
● <i>Persentase Konsistensi Program RPJMD Bid. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPD (%)</i>	<i>(Jumlah Program di RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama/Jumlah Program di RPJMD</i>	X 100%
● <i>Persentase Konsistensi Program RPJMD Bid. Infrastruktur dan Kewilayahan kedalam RKPD (%)</i>	<i>(Jumlah Program di RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan Nomenklatur dan Indikator yang sama/Jumlah Program di RPJMD</i>	X 100%
● <i>Jumlah Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang terevaluasi dan diterapkan (Proposal)</i>	<i>(Jumlah Kajian Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang terevaluasi dan diterapkan dalam perencanaan/Pembangunan (proposal)</i>	
● <i>Presentase PD yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik, konsisten dan selaras</i>	<i>(Jumlah PD Yang Telah Memiliki Dokumen Perencanaan Yang Baik, Kosisten Dan Selaras /Jumlah OPD</i>	X 100%
● <i>Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan</i>	<i>(Jumlah Usulan Desa/Kelurahan Yang Diakomodir /Jumlah Usulan Yang Diterima</i>	X 100%
● <i>Persentase kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang</i>	<i>(Jumlah Peserta Yang Hadir/Jumlah Undangan</i>	X 100%
● <i>Persentase hasil penelitian yang ditindaklanjuti stakeholder</i>	<i>(Jumlah Penelitian yang ditindak Lanjuti/Seluruh Penelitian</i>	X 100%
● <i>Indeks Inovasi Daerah</i>	<b>Standar Penilaian Kemendagri atas Inovasi Daerah (Innovation Government Award)</b>	

Dimana tujuan dan sasaran sebelum perubahan yaitu *Tersedianya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas* dengan indikator sasaran Peringkat Nilai LPPD Tingkat Propinsi dan setelah perubahan Renstra 2018 – 2023 sasaran menjadi *Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel* dengan indikator sasaran Nilai SAKIP. Dimana pencapaian target kinerja selama tiga tahun terakhir pada

indikator tujuan dan sasaran Terwujudnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan jangka Panjang, Menengah dan Tahunan dengan empat indikator sasaran yaitu Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD 2019 terealisasi 100 persen telah mencapai target, tahun 2020 teralisasi 91,9 persen target belum tercapai. Persentase Keselarasan Renja OPD dengan RKPD telah melebihi target, dua indikator sasaran telah mencapai target.

Sasaran Terwujudnya OPD Perencana Pembangunan Daerah yang Berkualitas dengan indikator sasaran nilai SAKIP/ LKJIP terealisasi BB melebihi target dari yang di tetapkan.

***“Secara umum seluruh target indikator kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 tercapai dengan baik”***

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian realisasi kinerja Barenlitbangda tiga tahun terakhir sebagai berikut :

1. Penyusunan rancangan Renja OPD yang merupakan bahan penyusunan RKPD belum sepenuhnya tepat waktu.
2. Data dari OPD dan instansi terkait belum optimal dan akurat, sehingga dalam mengevaluasi menemukan kesulitan.
3. Kurangnya upaya tindaklanjuti kerja sama yang telah dijalin oleh Pemerintah Kota Sawahlunto melalui perencanaan program/kegiatan sekaligus alokasi anggarannya.
4. Belum terintegrasinya perencanaan kerja sama dengan pengalokasian anggaran.
5. Banyaknya jenis laporan yang harus dipenuhi yang secara substansi sama sehingga pengumpulan data dari pihak yang terkait tidak tepat waktu.

Faktor-faktor pendorong dalam pencapaian target kinerja sebagai berikut :

1. Verifikasi terhadap rancangan Renja OPD telah dilakukan dengan berpedoman pada Renstra OPD dan RPJMD.
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui bimtek Perencanaan
3. Verifikasi terhadap rancangan Renja OPD telah dilakukan dengan berpedoman pada dokumen Rancangan RKPD.
4. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur Barenlitbangda Kota Sawahlunto.
5. Mulainya penerapan teknologi lebih lanjut pada beberapa sektor program/kegiatan pendukung pencapaian kinerja.
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat/stakeholder dalam keterlibatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
7. Peningkatan Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Urusan dan Pelayanan Publik.

Dalam pencapaian tujuan akhir Renstra yang dilakukan sebagai berikut :

1. Pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambattannya agar dilaksanakan serta hasil evaluasi disampaikan dan dikomunikasikan serta ditindaklanjuti kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara optimal.

2. Komitmen dari pucuk pimpinan dan jajaran struktural Barenlitbangda.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran Tahun 2020 merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja (*performance*) dan keberhasilan sebuah proses perencanaan akan sangat tergantung kemampuan masyarakat dalam membangun visi dan capaian kinerja pada Tahun 2020 terjadi peningkatan disebabkan karena :

1. Program strategis sebagai pedoman komprehensif yang jelas untuk menghadapi berbagai tantangan dan peluang eksternal.
2. Menerapkan pendekatan inklusif yang mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam permasalahan.
3. Komite perencanaan.
4. Keterlibatan dari pemimpin dan tokoh masyarakat.
5. Mempertajam tanggung jawab seluruh elemen dalam masyarakat untuk melaksanakannya proses perencanaan.
6. Koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait (OPD) mengenai proses perencanaan.



## **B A B V**

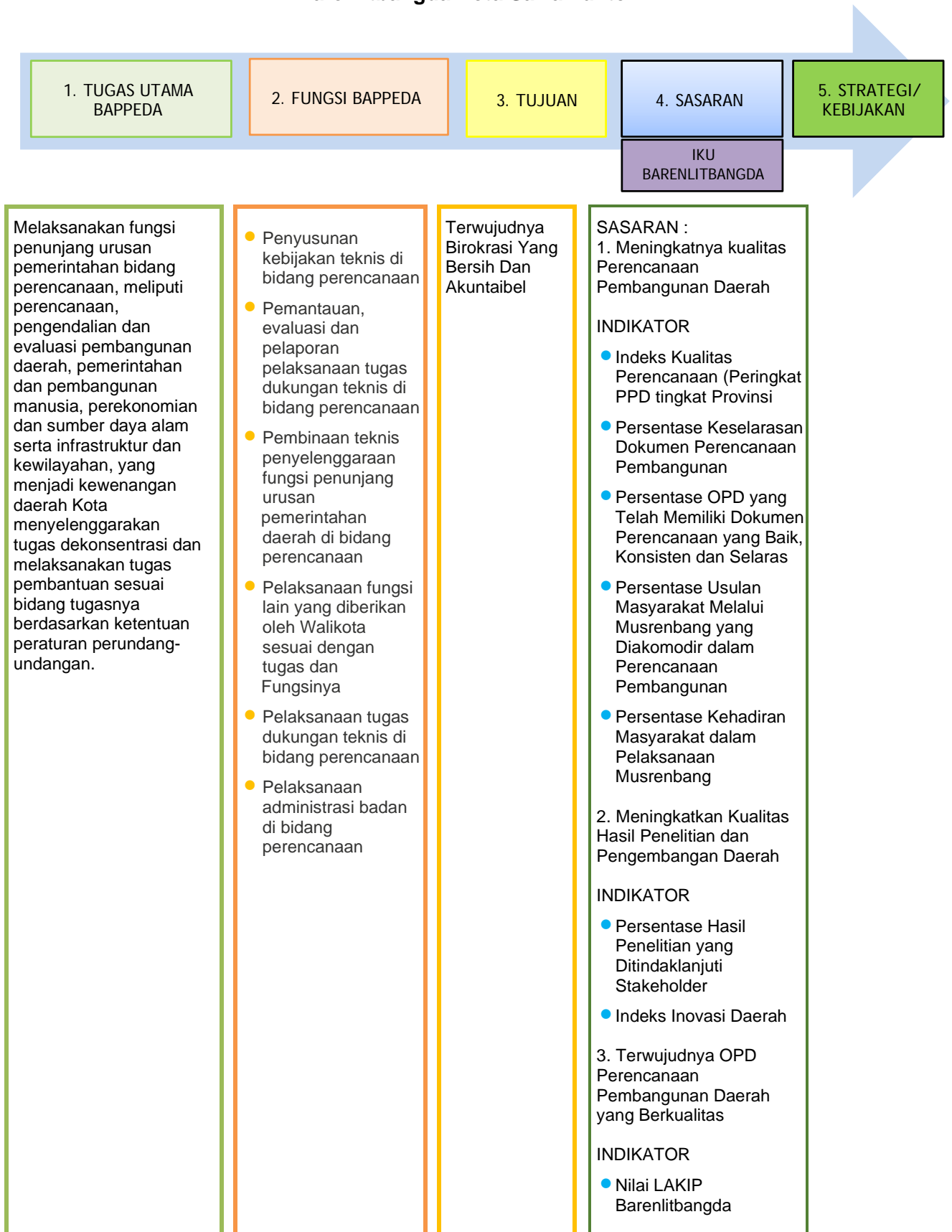
# **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan Barenlitbangda Kota Sawahlunto memperhatikan tugas dan fungsi Barenlitbangda sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan serta penyediaan data dan analisis pembangunan dalam lingkup Kota maupun internal organisasi. Sebagai perangkat daerah perumus perencanaan pembangunan dalam lingkup Kota tugas Barenlitbangda menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta penyediaan data untuk perencanaan pembangunan. Sebagai perangkat daerah internal organisasi, Barenlitbangda melaksanakan tugas dan fungsi administrasi serta peningkatan kapasitas SDM perencanaan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Perubahan Renstra dan juga Perubahan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Barenlitbangda yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Barenlitbangda serta dalam mengemban tugas dan fungsinya agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis serta pencapaian tujuan dan sasaran Barenlitbangda Kota Sawahlunto. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidak berhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi, sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional. Strategi dan arah kebijakan Barenlitbangda Kota Sawahlunto mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang perencanaan yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 dan dokumen RPJMD Perubahan Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, lengkap dengan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Gambar 4.1**  
**Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Barenlitbangda Kota Sawahlunto**



**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan program**  
**Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Sebelum Perubahan)**

Visi : Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, unggul, Bermartabat, Berkeadilan Dan Sejahtera				
Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
Tersedianya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas	Terwujudnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah, Tahunan	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah	Pengembangan Sistem perencanaan , penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Program perencanaan pembangunan daerah
			Peningkatan Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dengan jaminan keterbukaan informasi hasil perencanaan	
			Peningkatan kualitas konsistensi dan sinergisitas perencanaan melalui sistem yang transparan akurat dan akurat	
		Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akurat berbasis IT	Peningkatan konsistensi pengendalian dokumen perencanaan melalui E Planning	Program perencanaan pembangunan daerah
				Program Perencanaan Tata Ruang
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
	Pengembangan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Litbang		

**Visi : Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, Inovatif, unggul, Bermartabat, Berkeadilan Dan Sejahtera**

**Misi 4 : Menghadirkan Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Inovatif**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>PROGRAM</b>
				Program Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah
				Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
				Program Perencanaan Pembangunan Sarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
	Terwujudnya OPD Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan secara Konsisten dan berkelanjutan	Pengembangan sistem perencanaan pembangunan dengan dukungan komitmen dan motivasi kerja yang kuat dalam proses perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	
Meningkatkan koordinasi transparan dan hubungan kemitraan dengan berbagai pihak dalam proses battom up dan top down Perencanaan Pembangunan Daerah				
Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Barenlitbangda		Peningkatan kualitas SDM Perencana di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Desa	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah

**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan program**  
**Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Sesudah Perubahan)**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Optimalisasi hasil pengendalian dan evaluasi	Pengembangan Sistem perencanaan , penganggaran, monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
			Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan
		Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dengan jaminan keterbukaan informasi hasil perencanaan
		Meningkatkan keterpaduan, sinergitas, sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas konsistensi dan sinergitas perencanaan melalui sistem yang transparan akuntabel dan akurat
			Meningkatkan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian, Sumber Daya Alam (SDA) dan Infrastruktur dan Kewilayahan
		Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsisten dan akuntabel berbasis IT	Menerapkan Aplikasi e-budgeting (SIPKD) secara terintegrasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan
		Meningkatkan kualitas database perencanaan pembangunan daerah yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem database perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Mengembangkan sistem database perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antara OPD dengan Desa/Kelurahan di Kota Sawahlunto
	Pengembangan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan		
		Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Pemerintah Terdepan secara Konsisten dan berkelanjutan	Pengembangan sistem perencanaan pembangunan dengan dukungan komitmen dan motivasi kerja yang kuat dalam proses perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

			Meningkatkan koordinasi transparan dan hubungan kemitraan dengan berbagai pihak dalam proses bottom up dan top down Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatkan kualitas manajemen organisasi melalui peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas kinerja keuangan dan database Barenlitbangda	Peningkatan kualitas SDM Perencana di Tingkat Kota, Perangkat Daerah dan Desa
		Penyempurnaan dan penerapan SOP Barenlitbangda	Evaluasi dan revisi SOP Barenlitbangda
			Penerapan SOP secara konsisten
		Penataan SDM pegawai berdasarkan kompetensi dan pendidikan	Penetapan kinerja Barenlitbangda
			Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perencanaan bagi seluruh ASN
	Meningkatkan Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian / kajian dalam pengambilan kebijakan daerah	Meningkatkan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	Terwujudnya OPD Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Penataan SDM pegawai berdasarkan kompetensi dan pendidikan	Penetapan kinerja Barenlitbangda
			Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perencanaan bagi seluruh ASN
		Peningkatan sarana dan prasarana kantor yang mendukung kinerja pegawai	Inventarisasi dan pendayagunaan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor

Dilihat dari tabel diatas perubahan strategi dan arah kebijakan pada Renstra 2018 – 2023 disebabkan karena adanya Pandemi Covid – 19 selain itu juga adanya perubahan Kebijakan Nasional dalam periode paruh waktu berupa perubahan nomenklatur, klasifikasi dan kodefikasi Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga terjadi perubahan target sesuai dengan revisi RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2018 – 2023 ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan, kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan perlu dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

## B A B VI

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Barenlitbangda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Rencana program dilengkapi dengan *outcome* program beserta target capaiannya dan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan program. Demikian pula untuk rencana kegiatan dilengkapi dengan *output* kegiatan beserta target capaiannya dan pagu indikatif kegiatan. *Outcome* program dan *output* kegiatan saling berkaitan, dimana *outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya *output* dari kegiatan-kegiatan dalam program tersebut. Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Pada Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 sebelum perubahan, telah disusun serangkaian rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2018-2023. Selanjutnya dengan ditetapkannya Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto yang diikuti Perubahan Renstra Barenlitbangda dan kemudian Perubahan Renstra Barenlitbangda, maka perlu dilakukan penyesuaian serta penataan program dan kegiatan dalam rangka akselerasi pencapaian tujuan dan sasaran Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

Penyesuaian serta penataan program dan kegiatan pada Perubahan Renstra dan Perubahan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdapat program dengan indikator outcome yang tidak terukur, tidak berorientasi hasil serta kurang tajam dan terarah.
2. Terdapat program yang terdiri dari kegiatan dengan indikator output yang kurang relevan dalam mendukung pencapaian outcome program.
3. Terdapat program dengan nomenklatur program yang kurang dapat menggambarkan kinerja bidang pelaksana.
4. Terdapat program yang dilaksanakan lebih dari satu bidang, namun tidak terlihat indikator kinerja yang jelas dari setiap bidang pelaksana.
5. Terdapat program yang tumpang tindih fungsinya dengan program lain.
6. Terdapat program yang perlu disinergikan dengan program lain dengan sasaran program yang sama.



Kebijakan dan strategi ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan yang memperhatikan tugas dan fungsi Barenlitbangda Kota Sawahlunto. Program dan Kegiatan disusun berdasarkan Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sebelumnya ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Kebijakan ini menjadi salah satu dasar dalam menyusun Perubahan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Selain hal-hal tersebut di atas juga diambil kebijakan sehubungan penyesuaian serta penataan program dan kegiatan yaitu efisiensi jumlah kegiatan dengan mensinergikan beberapa kegiatan yang saling terkait menjadi satu kegiatan. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Barenlitbangda Kota Sawahlunto. Efisiensi jumlah kegiatan terutama dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinatif. Adapun hasil penataan program dan kegiatan pada Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan tahun 2018 – 2020 Barenlitbangda Kita Sawahlunto (Sebelum Perubahan)**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian awal tahun perencanaan									Bidang Penanggung Jawab		
						2017		2018			2019			2020			
						Target	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target		Kinerja	Rp (Juta)
Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas					NILAI LPPD PERINGKAT PROPINSI											Barenlit bangda	
	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan yang sesuai Kaidah dan aturan Perencanaan		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTSE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD						100	100	451,127,600	100	100	1,055,000,000	Barenlit bangda
					PERSENTASE KESEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUNAN DAN LIMA TAHUN	7	359,356,410	7	7	262,057,529							Barenlit bangda
				Forum Gabungan SKPD	Persentase OPD yang mengikuti Forum Gabungan (%)	100	18,372,885	100	100	18,954,205							Barenlit bangda
				Forum Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Forum Konsultasi Publik (Laporan)						1	1	35,000,000	1	1	35,000,000	Barenlit bangda
				Musrembang Kota Sawahlunto	Jumlah Berita Acara yang Tersedia (Dokumen)	1	77,081,025	1	1	110,282,503							Barenlit bangda
				Penyelenggaraan Musrembang RKPD Kota Sawahlunto	Jumlah Berita Acara Pembahasan (Laporan)						1		119,127,600	1	1	120,000,000	Barenlit bangda
				Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Kota Sawahlunto)	Jumlah dokumen RKPD yang disusun (dokumen)	1	59,706,150	1	1	38,003,351	1		75,000,000	1	1	75,000,000	Barenlit bangda
				Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Perubahan	Jumlah Dokumen RKPD P yang disusun (dokumen)	1	40,351,000	1	1	29,164,010	1		25,000,000	1	1	35,000,000	Barenlit bangda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian awal tahun perencanaan										Bidang Penanggung Jawab	
						2017		2018			2019			2020			
						Target	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja		Rp (Juta)
				Lanjutan Penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto 2018-2023	Jumlah Dokumen RPJMD Sawahlunto yang disusun (Dokumen)						1	1	75,000,000				Barenlitbangda
				Revisi Penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto 2018-2023	Jumlah Dokumen Revisi RPJMD Sawahlunto yang disusun (Dokumen)												Barenlitbangda
				Penyusunan KUA Dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun (Dokumen)	2	84,329,450	2	2	34,034,610	2	2	61,000,000	2	2	70,000,000	Barenlitbangda
				Penyusunan KUA Dan PPAS Perubahan	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Perubahan yang disusun (Dokumen)	2	79,515,900	2	2	31,618,850	2	2	61,000,000	2	2	70,000,000	Barenlitbangda
				Revisi PRPJPD Kota Sawahlunto	Jumlah Dokumen Revisi RPJPD Kota Sawahlunto									1	2	650,000,000	Barenlitbangda
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK</b>	<b>PRESENTASE KEGIATAN DATA PROFIL (%)</b>						<b>100</b>	<b>1001</b>	<b>261,649,150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>150,000,000</b>	<b>Barenlitbangda</b>
				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI</b>	<b>KESEDIAAN DATA/INFORMASI DAERAH (%)</b>	<b>99</b>	<b>228,864,017</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>48,870,192</b>							<b>Barenlitbangda</b>
				Penyusunan Data Profil Daerah Kota Sawahlunto	Buku Profil Tahunan sesuai dengan TOR (Dokumen)	1	93,909,325										Barenlitbangda
				Penyusunan Data Pokok Perencanaan	Jumlah data perencanaan yang tersedia (Data)	4275		4275	4275	6,877,100	4.275	4275	152,450,000	4275	4275	50,000,000	Barenlitbangda
				Pengembangan Data Base Perencanaan Berbasis SIG	Jumlah Website Perencanaan yang dikelola (Unit)	1	134,954,692	1	1	41,993,092	1	1	109,199,150	1	1	100,000,000	Barenlitbangda
				<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG LITBANG</b>	<b>JUMLAH DOKUMEN YANG DISUSUN (DOK)</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>32,467,050</b>	<b>100</b>	<b>100 1</b>	<b>148,196,250</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>525,000,000</b>	<b>Barenlitbangda</b>
				Penyusunan Rencana Induk Kelitbang	Jumlah Dokumen yang disusun (Dokumen)						1		98,266,900				Barenlitbangda
				Koordinasi Kegiatan Kelitbang	Jumlah Kegiatan Kelitbang									12	12	100,000,000	Barenlitbangda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian awal tahun perencanaan									Bidang Penanggung Jawab		
						2017		2018			2019			2020			
						Target	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target		Kinerja	Rp (Juta)
				Fasilitas Kerjasama Kelitbangan	Jumlah Kegiatan Kelitbangan								1	1	75,000,000	Barenlitbangda	
				Fasilitasi Kegiatan Penelitian/Lomba Iptek dan Kelitbangan	Jumlah Kegiatan Kelitbangan								2	1	100,000,000	Barenlitbangda	
				Kegiatan Pengkajian Kebijakan Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan Kelitbangan								1	1	200,000,000	Barenlitbangda	
				Fasilitasi Kelitbangan	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Kelitbangan			12	12	32,467,050	3	3	49,929,350	3	3	50,000,000	Barenlitbangda
				<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH</b>	<b>JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH (DOK)</b>												
				<b>PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD BIDANG FISIK KEDALAM RKPD</b>						100	001	550,000,000			Barenlitbangda	
					<b>KETERSEDIAAN MASTER PLAN AIR LIMBAH</b>												
				Penyusunan Database Jalan Lingkungan	Jumlah Database Jalan Lingkungan yang disusun (Dok)						1	1	250,000,000			Barenlitbangda	
				Penyusunan Database Bangunan Pemerintah	Jumlah Database Bangunan Pemerintahan yang disusun (Dok)						1	1	300,000,000			Barenlitbangda	
				<b>PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG</b>	<b>PERSENTASE KESEDIAAN DOKUMEN INFORMASI TATA RUANG</b>						100	100	199,999,800	100	100	285,000,000	Barenlitbangda
				<b>PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG</b>	<b>KETERSEDIAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DENGAN RENCANA TATA RUANG</b>	1	213,834,740	1	1	420,162,722						Barenlitbangda	
				Fasilitasi Penetapan Kebijakan Revisi Perda RTRW 2012-	Jumlah Perda yang ditetapkan (Perda)						1	1	199,999,800			Barenlitbangda	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian awal tahun perencanaan										Bidang Penanggung Jawab	
						2017		2018			2019			2020			
						Target	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja		Rp (Juta)
				2023 Kota Sawahlunto													
				Lanjutan Penyusunan Ranperda Revisi RTRW 2020-2032	Jumlah Perda yang ditetapkan (Perda)								1	1	150,000,000	Barenlitbangda	
				Penyusunan Dokumen Revisi RTRW 2012-2023	Jumlah Dokumen RTRW 2012-2023 yang direvisi (Dokumen)			1	1	420,162,722						Barenlitbangda	
				Penyusunan Dokumen Peninjauan Kembali (PK) RTRW 2012-2023	Jumlah Dokumen Peninjauan Kembali (PK) RTRW 2012-2023 yang disusun (Dokumen)	1	182,280,890									Barenlitbangda	
				Koordinasi Bidang Tata Ruang	Jumlah Laporan Koordinasi Bidang Tata Ruang								4	4	50,000,000	Barenlitbangda	
				Sosialisasi peraturan tentang tata ruang	Jumlah Peserta Sosialisasi peraturan tentang Tata ruang								250	250	85,000,000	Barenlitbangda	
				Koordinasi Penunjang kegiatan BKPRD	Jumlah Laporan/Rekomendasi Pembahasan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	8	31,553,850									Barenlitbangda	
				<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>	<b>PERSENTSE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD BIDANG EKONOMI KEDALAM RKPD</b>						100	100	1	100	4,277,398,980	Barenlitbangda	
					<b>KESEDIAAN DOKUMEN PEMBANGUNAN EKONOMI (DOKUMEN)</b>			1	1	215,591,890	100	100	100	100	291,290,450	100,000,000	Barenlitbangda
				Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPARDA) Kota Sawahlunto	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPARDA) Kota Sawahlunto yang disusun (Dokumen)			1	1	215,591,890						Barenlitbangda	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian awal tahun perencanaan										Bidang Penanggung Jawab	
						2017		2018			2019			2020			
						Target	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja		Rp (Juta)
				Penyusunan RIPIDA Kota Sawahlunto	Jumlah Dokumen RIPIDA Kota Sawahlunto (Dok)						1	1	291,290,450				Barenlitb angda
				Lanjutan Penyusunan RIPIDA Kota Sawahlunto	Jumlah Dokumen RIPIDA Kota Sawahlunto (Dok)								1	1		100,000,000	Barenlitb angda
	Terwujudnya Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RPJPD		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG LITBANG	JUMLAH DOKUMEN YANG DISUSUN (DOK)									12	12	435,000,000	Barenlit bangda
		Persentase Keselarasan RKPd dengan RPJMD		PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGKAJIAN DAERAH	JUMLAH KEGIATAN YANG DIFASILITASI (KEG)												Barenlit bangda
		Persentase Keselarasan Renstra OPD dengan RPJMD		Penguatan Sestim Inovasi Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun (Dokumen)									1	1	200,000,000	Barenlitb angda
		Persentase Keselarasan Renja OPD dengan Renstra OPD		Fasilitasi Tenaga Ahli/Dewan Pakar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Tenaga Ahli (Laporan)						1		35,000,000	1	11	35,000,000	Barenlitb angda
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RTRW		PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERSENTSE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPd						100	100	332,318,050	100	100	200,000,000	Barenlitb angda
					PERSENTASE KESEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUNAN DAN LIMA TAHUN	7	271,880,600	7	7	233,436,132							Barenlitb angda
				Penyusunan Grand Design Smart City Kota Sawahlunto	Jumlah Sestim yang dibangun (Unit)	1	106,816,000										Barenlitb angda
				Lanjutan Grand Design Smart City Kota Sawahlunto	Jumlah Sestim yang dibangun (Unit)			1	1	94,562,082	1	1	132,318,050				Barenlitb angda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian awal tahun perencanaan										Bidang Penanggung Jawab	
						2017		2018			2019			2020			
						Target	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja		Rp (Juta)
				Penyusunan E-Planning	Aplikasi yang dikelola (Tahun)	1	165,064,600	1	1	138,874,050							Barenlitbangda
				Pengelolaan E planning	Jumlah Aplikasi yang dikelola (Unit)						12	12	200,000,000	12	121	200,000,000	Barenlitbangda
				<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>PERSENTSE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPd</b>						100	12	796,199,200	100	100	1,248,699,490	Barenlitbangda
					<b>PERSENTASE KESEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUNAN DAN LIMA TAHUN</b>	7	363,370,285	7	7	832,031,024							Barenlitbangda
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Bidang Infrastruktur (Laporan)			1	1	82,979,896	12	12	49,699,300	Keg.RPIJ M-CK Perumahan, Pemukiman	Keg.RPIJM -CK Perumahan, Pemukiman	49,699,300	Barenlitbangda
				Evaluasi RPJMD 2013-2018	Jumlah Laporan Evaluasi RPJMD (Laporan)			1	1	11,502,875				1	11	50,000,000	Barenlitbangda
				Evaluasi RPJPD Kota Sawahlunto	Jumlah Dokumen evaluasi RPJPD (Dokumen)						1		300,000,000				Barenlitbangda
				Penyusunan dokumen Rencana Induk Drainase Kota	Jumlah dokumen Rencana Induk Drainase Kota yang disusun (Dok)						1	1	300,000,000				Barenlitbangda
				Verifikasi Renstra OPD Tahun 2018-2023	Jumlah Dokumen Renstra OPD Tahun 2018-2023 yang diVerifikasi (Dokumen)						26	26	50,000,000	0		-	Barenlitbangda
				Verifikasi Renja OPD	Jumlah Berita Acara Pembahasan						26	26	29,518,900	26	26	35,000,000	Barenlitbangda
				Pembangunan grand design pembangunan kependudukan	Jumlah Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan									1	1	300,000,000	Barenlitbangda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian awal tahun perencanaan										Bidang Penanggung Jawab	
						2017		2018			2019			2020			
						Target	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja		Rp (Juta)
				Fasilitasi kegiatan Fasbangkot dalam pembangunan desa/kelurahan di Kecamatan	Jumlah Anggota Fasbangkot yang difasilitasi (Org)	5	75,392,175	5	5	11,605,155	5	5	16,981,100	5	5	19,000,000	Barenlitbangda
				Pengendalian perencanaan pembangunan desa	Jumlah Perencanaan Desa yang dikendalikan (Desa)	27	67,328,535	27	27	31,913,943				27	27	40,000,000	Barenlitbangda
					Jumlah Dokumen RKP DES Perencanaan Pembangunan Daerah												
				Sosialisasi RAPBD	Jumlah peserta sosialisasi RAPBD (Orang)	427	39,225,700	300	100	42,315,545				300	300	85,000,000	Barenlitbangda
				Fasilitas Penataan Kampung Produktif	Jumlah Dokumen Perencanaan Kampung Produktif (Dokumen)	2	120,552,425			87,539,370							Barenlitbangda
				Pengukuran Capaian Kinerja RPJMD Kota Sawahlunto	Jumlah Laporan Hasil pengukuran Kinerja RPJMD (Laporan)	1	14,803,575										Barenlitbangda
				Penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023	Jumlah Dokumen RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 yang disusun (Dokumen)			1	1	508,501,574							Barenlitbangda
				Monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Laporan Monev yang dilaksanakan (Laporan)	1	46,067,875	1	1	8,606,000	4	4	49,999,900	4	4	60,000,000	Barenlitbangda
					Jumlah Laporan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Laporan)												Barenlitbangda
				Penyusunan KLHS RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 yang disusun (Laporan)			1	1	12,921,136							Barenlitbangda



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian awal tahun perencanaan										Bidang Penanggung Jawab	
						2017		2018			2019			2020			
						Target	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja		Rp (Juta)
				Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023	Jumlah Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 yang disusun (Dokumen)			1	1	34,145,530							Barenlitbangda
				<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>	<b>PERSENTSE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD BIDANG EKONOMI KEDALAM RPKD</b>						100	1001	191,040,200	100	10	560,000,095	Barenlitbangda
					<b>KESEDIAAN DOKUMEN PEMBANGUNAN EKONOMI (DOKUMEN)</b>	4	100,014,725	4	4	87,405,560							Barenlitbangda
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Ekonomi	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan (Lap)	4	21,847,950	4	4	10,996,050	4	4	49,997,950	4	4	50,000,000	Barenlitbangda
					Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi (Lap)												Barenlitbangda
				Monev Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Khusus	Jumlah Laporan Monev Percepatan Pembangunan Bidang Ekonomi Kawasan Khusus (Lap)						4	4	49,973,750				Barenlitbangda
				Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lap)						1	1	91,068,500	1	1	95	Barenlitbangda
				Koordinasi Perencanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (Laporan)	1	78,166,775			76,409,510							Barenlitbangda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian awal tahun perencanaan										Bidang Penanggung Jawab	
						2017		2018			2019			2020			
						Target	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja		Rp (Juta)
				Evaluasi pengembangan Usaha UMKM dikota sawahlunto	Jumlah dokumen evaluasi kebijakan pengembangan usaha UMKM dikota sawahlunto (dok)									1	1	80,000,000	Barenlitb angda
				Evaluasi Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Laporan evaluasi Ekonomi Kerakyatan (Lap)									1	1	80,000,000	Barenlitb angda
				Penyusunan Dokumen Derajat Ekonomi Daerah	Jumlah Dokumen Derajat Ekonomi Daerah yang disusun (Dok)									1	1	200,000,000	Barenlitb angda
				Evaluasi Dokumen Derajat Ekonomi Daerah	Jumlah laporan evaluasi dokumen derajat ekonomi daerah (lap)												Barenlitb angda
				Penyusunan Indek Daya saing Daerah Kota Sawahlunto	Jumlah Dokumen Indek Daya Saing daerah Kota Sawahlunto									1	11	150,000,000	Barenlitb angda
				<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH</b>	<b>JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH (DOK)</b>						100	1001	128,554,800				Barenlitb angda
				<b>PROGARM PEMBANGUNAN SARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM</b>	<b>PERSENTASE KONSISTENSI PROGRAM rpjmd BIDANG FISIK KEDALAM RKPD</b>						100	100	175,000,000	100	1001	758,000,000	Barenlitb angda
					<b>KETERSEDIAAN MASTER PLAN AIR LIMBAH</b>	1	610,009,213	4	4	94,527,882							Barenlitb angda
				Penyusunan Dokumen Pengembangan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Dokumen pengembangan Penerangan Jalan Umum Kota Sawahlunto yang disusun (Dok)						1	1	175,000,000				Barenlitb angda
				Fasilitas Program Kelistrikan Kota Sawahlunto	Kegiatan Fasilitas Program Kelistrikan yang difasilitasi (Keg)												Barenlitb angda
				Penyusunan Dokumen Pengembangan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan Kota Sawahlunto	Jumlah Dokumen Pengembangan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan yang disusun (Dokumen)												Barenlitb angda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian awal tahun perencanaan									Bidang Penanggung Jawab		
						2017		2018			2019			2020			
						Target	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target		Kinerja	Rp (Juta)
				Fasilitasi Program Nasional Berbasis Masyarakat	Jumlah Kegiatan Nasional yang difasilitasi			4 Kotaku, AMPL, PANSIMAS, SANIMAS	4 Kotaku, AMPL, PANSIMAS, SANIMAS	94,527,882	4 Kotaku, AMPL, PANSIMAS, SANIMAS	4 Kotaku, AMPL, PANSIMAS, SANIMAS	128,554,800	4 Kotaku, AMPL, PANSIMAS, SANIMAS	4 Kotaku, AMPL, PANSIMAS, SANIMAS	178,000,000	Barenlitb angka
					Jumlah Kegiatan Berbasis asyarakat yang difasilitasi (Keg)												Barenlitb angka
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kebina Margaan	Jumlah Laporan Koordinasi Kebina Margaan									4	4	40,000,000	Barenlitb angka
				Fasilitas Infrastruktur Kebinamargaan	Jumlah Kegiatan Kebinamargaan yang difasilitasi (Kegiatan)	1	332,056,843										Barenlitb angka
				Koordinasi penyusunan perencanaan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup	Jumlah dokumen perencanaan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan hidup									1	1	150,000,000	Barenlitb angka
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistik irigasi Partisipatif	Jumlay Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistik irigasi Partisipatif (Laporan)									1	1	175,000,000	Barenlitb angka
				Fasilitas Infrastruktur Bidang Cipta Karya	Jumlah Bidang Cipta Karya yang difasilitasi	1	65,328,155							1	1	150,000,000	Barenlitb angka
				Fasilitas Kegiatan Hibah Air Minum Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum									550	550	65,000,000	Barenlitb angka
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Perbatasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Kawasan Perbatasan Perdesaan yang disusun (Dokumen)	1	212,624,215										Barenlitb angka
				<b>PROGRAM PENCAPAIAN DAERAH PERBATASAN</b>	<b>DOKUMEN PENCAPAIAN DAERAH PERBATASAN</b>			1	1	209,087,510							Barenlitb angka

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian awal tahun perencanaan										Bidang Penanggung Jawab	
						2017		2018			2019			2020			
						Target	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja		Rp (Juta)
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Kawasan Perbatasan Perdesaan yang disusun (Dokumen)			1	1	209,087,510							Barenlitbangda
				<b>PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA</b>	<b>PERSENTSE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD BIDANG SOSIAL BUDAYA KEDALAM RKPD</b>						100	100	345,458,750	100	100	265,000,000	Barenlitbangda
					<b>KESEDIAAN DOKUMEN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA (DOKUMEN)</b>	4	26,302,515	4	4	40,734,420							Barenlitbangda
				Penyusunan grand design kesehatan	Jumlah Dokumen Grand Design Kesehatan												Barenlitbangda
				Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi (Laporan)						8	8	34,994,350	4	4	50,000,000	Barenlitbangda
					Jumlah Laporan Koordinasi Bidang Sosbud (Laporan)												Barenlitbangda
				Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Dasar Bidang Sosial Budaya	Kesediaan Dokumen Pembangunan Sosial Budaya (Laporan)	4	26,302,515	4	4	25,413,965							Barenlitbangda
				Koordinasi Program Pengarusutan Gender ((PUG)	JumlahLaporan Koordinasi Pengarusutan Gender ((PUG) (Laporan)						4	4	30,554,450	4	4	35,000,000	Barenlitbangda
				Koordinasi Program Kota Sehat	Jumlah Laporan Koordinasi Program Kota Sehat (Laporan)						4	4	29,910,000	4	4	30,000,000	Barenlitbangda
				Penyusunan Grand Design Pendidikan	Jumlah dokumen grand Design yang disusun(Laporan)						1	1	249,999,950				Barenlitbangda
				Lanjutan Penyusunan Garand Design Pendidikan	Jumlah dokumen grand Design yang disusun(Laporan)									1	1	150,000,000	Barenlitbangda
				Evaluasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi (Laporan)					15,320,455							Barenlitbangda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian awal tahun perencanaan										Bidang Penanggung Jawab	
						2017		2018			2019			2020			
						Target	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja		Rp (Juta)
				Pendidikan Kota Sawahlunto													
<b>Terwujudnya Lembaga Perencanaan Daerah yang Berkualitas</b>	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keuangan dan Pelaporan di Barenlitbangda	Nilai LKJIP		<b>PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>TERSEDIAANYA SARANA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	12	251,933,957	12	12	297,117,883	12	121	409,208,000	12	12	449,850,000	Barenlit bangda
		Capaian Kinerja Kegiatan Barenlitbangda		Penyerdiaan Surat menyurat	Jasa Surat menyurat yang disediakan (bln)	12	8,733,000	12	12	3,704,500	12	21	8,850,000	12	12	9,735,000	Barenlitb angda
		Jumlah Kegiatan Pendukung Peningkatan Administrasi Kantor			Jumlah Surat Keluar Selama Satu Tahun (Tahun)									1	1		Barenlitb angda
		Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelatihan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air da Listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan (bln)	12	29,143,612	12	12	25,180,917	12	21	49,200,000	12	12	54,120,000	Barenlitb angda
		Jumlah Diklat Bintek Yang Diikuti			Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									12	121		Barenlitb angda
		Tingkat Kenyaman Kerja (Angkor)		Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Jumlah Jasa kebersihan kantor yang disediakan (bln)	12	14,110,000	12	12	4,400,350	12	12	6,601,000	12	12	7,261,000	Barenlitb angda
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan (bln)	12	29,346,570	12	12	18,914,700	12	121	24,940,000	12	12	27,439,000	Barenlitb angda
					Jumlah Alat Kantor yang disediakan (Jenis)												Barenlitb angda
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan yang disediakan (bln)	12	41,502,450	12	12	36,249,775	12	12	39,650,000	12	12	43,615,000	Barenlitb angda
					Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan (Jenis)									..... Jenis			Barenlitb angda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian awal tahun perencanaan											Bidang Penanggung Jawab
						2017		2018			2019			2020			
						Target	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen listrik/penerangan yang disediakan (bln)	12	5,461,800	12	12	1,890,900	12	12	2,000,000	12	12	27,439,000	Barenlitb angda
					Jumlah Komponen listrik/Penerangan Bangunan Kantor (Jenis)												Barenlitb angda
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan Perundang-undangan yang disediakan (Bulan)	1	4,447,000	1	1	4,500,000	1	1	8,292,000	1	1	9,121,000	Barenlitb angda
					Jumlah Bahan bacaan Perundang-undangan yang disediakan (Jenis)									.....Koran, .....Buku	1		Barenlitb angda
				Penyediaan Makan dan Minum	Makan minum yang disediakan (bln)	12	22,869,525	12	12	8,412,075	12	121	26,600,000	12	12	26,000,000	Barenlitb angda
					Jumlah Konsumsi Rapat dan Tamu (bln)									12	12		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	Jumlah tenaga pegawai Non PNS yang difasilitasi (org)	12	87,775,000	12	12	180,591,666	6	6	222,625,000	6	6	222,625,000	Barenlitb angda
				Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	Jumlah Dokumentasi dan dekorasi yang disediakan (bln)	12	8,545,000	12	12	13,273,000	12	121	20,450,000	12	12	22,495,000	Barenlitb angda
				<b>PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>TERSEDINYA SARANA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	12	267,710,129	12	12	233,987,997	12	12	145,500,000	12	12	160,000,000	Barenlitb angda
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang difasilitasi (bln)	12	267,710,129	12	12	233,987,997	12	12	145,500,000	6	6	160,000,000	Barenlitb angda
					Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar (Kali)									.... Kali			Barenlitb angda
				<b>PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PRESENTASE APARATUR YANG MENINGKAT SDMNYA</b>						19	19	150,000,000	19	19	150,000,000	Barenlitb angda
					<b>JUMLAH APARATUR YANG</b>	12	162,774,812	12	12	135,799,971							Barenlitb angda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian awal tahun perencanaan										Bidang Penanggung Jawab	
						2017		2018			2019			2020			
						Target	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja		Rp (Juta)
					<b>MENINGKAT KOPETENSINYA</b>												
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (Org)	15	162,774,812	15	15	135,799,971	15	15	100,000,000	15	15	100,000,000	Barenlitb angda
				Pendidikan dan Pelatihan Bagi Fungsional Tertentu	Jumlah pejabat fungsional yang mengikuti diklat (Org)						4	4	50,000,000	4	4	50,000,000	Barenlitb angda
				<b>PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>TERSEDIAANYA SARANA PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	12	104,589,600	12	12	169,793,670	12	12	162,000,000	12	12	187,000,000	<b>Barenlit bangda</b>
				Penatausahaan Keuangan dan Barang	Penatausahaan keuangan yang dilaksanakan (bln)	12	104,589,600	12	12	169,793,670	12	12	162,000,000	12	12	187,000,000	Barenlitb angda
					Penatausahaan keuangan yang dilaksanakan (bln)									6 (LRA, Neraca, )perasional Laporan Perubahan Ekuitas, CALK, SPM	6 (LRA, Neraca, )perasional Laporan Perubahan Ekuitas, CALK, SPM		Barenlitb angda
				<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>PERSENTSE KONSISTENSI PROGRAM RPJMD KEDALAM RKPD</b>						4	4	65,000,000	4	4	80,000,000	<b>Barenlit bangda</b>
					<b>PERSENTASE KESEDIAAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUNAN DAN LIMA TAHUN</b>	4	21,847,950	4	4	44,139,282							Barenlit bangda
				Koordinasi Pengendalian Pelaporan Pelaksanaan DAK, Dekon dan Tugas Pembantuan	Laporan Rapat Koordinasi	4	21,847,950	4	4	44,139,282	4	4	65,000,000	4	4	80,000,000	Barenlitb angda
				<b>PROGRAM PENINGKATAN</b>	<b>PENINGKATAN SARANA DAN</b>	12	160,471,498	12	12	123,859,737	12	121	523,600,000	12	2	635,000,000	<b>Barenlit bangda</b>

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian awal tahun perencanaan										Bidang Penanggung Jawab	
						2017		2018			2019			2020			
						Target	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja	Rp (Juta)	Target	Kinerja		Rp (Juta)
				<b>SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>SARANA APARATUR</b>												
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor yang disediakan (bln)			12	12	27,766,500	5	5	75,500,000			Barenlitbangda	
					Jumlah Peralatan gedung kantor yang diadakan (Buah)								.....Buah			Barenlitbangda	
				Pengadaan Mobiler Kantor	Jumlah Mobiler yang diadakan (Buah)						1	11	75,000,000	1	1	200,000,000	Barenlitbangda
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung Kantor yang dipelihara (Bulan)	12	15,469,000	12	12	6,200,000	12	21	50,000,000	12	21	55,000,000	Barenlitbangda
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Roda dua dan roda empat yang dipelihara (bln)	12	133,015,998	12	12	107,110,737	12	12	152,700,000	12	12	150,000,000	Barenlitbangda
					Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Buah)								..... Mobil, .....Honda			Barenlitbangda	
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Peralatan gedung kantor yang dipelihara(Bln)	12	11,986,500	12	12	10,549,000	12	12	20,400,000	12	12	30,000,000	Barenlitbangda
					Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor (Jenis)								..... AC .....Laptop .....Printer			Barenlitbangda	
				Rehap Bangunan Kantor	Jumlah Bangunan Kantor yang diRehap (Unit)									1		200,000,000	Barenlitbangda
				Rehap Interior ruangan kantor	Jumlah ruangan yang direhap (Unit)						1		150,000,000			Barenlitbangda	



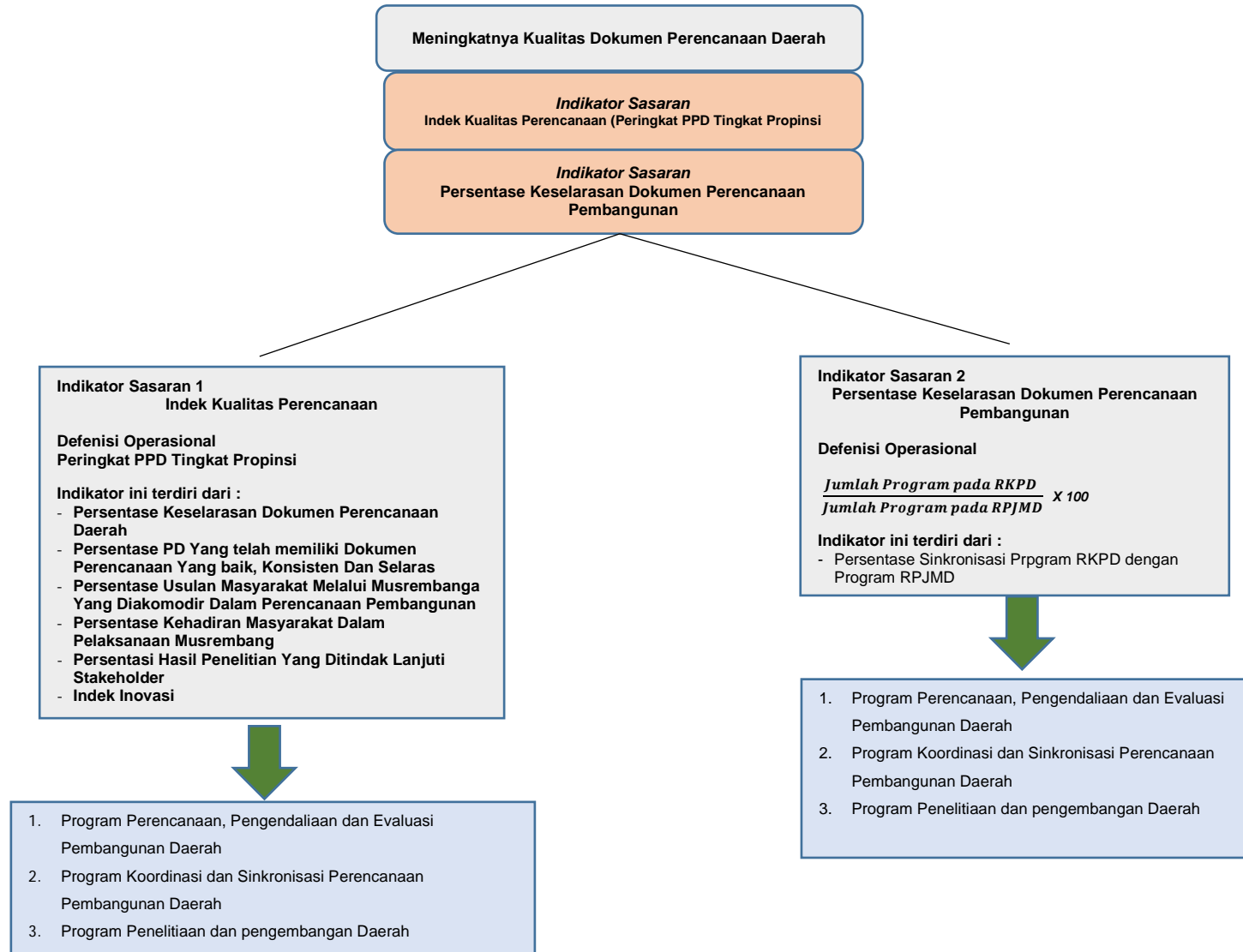
Selanjutnya dalam penentuan indikator *outcome* program dan juga indikator *output* kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta disesuaikan dengan susunan organisasi Barenlitbangda Kota Sawahlunto, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.

Terkait penentuan indikator *outcome* program pada bab-bab sebelumnya telah ditetapkan sasaran pada Perubahan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 yaitu : (1) **Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah** dengan lima indikator. (2) **Meningkatkan Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah** dengan dua indikator. (3) **Terwujudnya OPD Perencana Pembangunan Daerah yang berkualitas** dengan indikator satu indikator. Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan program-program utama yang menjadi *core business* Barenlitbangda Kota Sawahlunto (sesuai penataan mulai tahun 2021) yaitu:

1. Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian dan pengembangan Daerah

Adapun kerangka alur pikir dalam penentuan indikator *outcome* dari masing-masing program utama dalam rangka mendukung pencapaian indikator sasaran tersaji pada gambar sebagai berikut :

**Gambar 6.2 Kerangka Alur Pikir Penentuan Indikator outcome Program Utama pada Perubahan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2021 – 2023**



Selain program-program utama tersebut, juga terdapat program-program yang bersifat menunjang pelaksanaan program-program utama. Program-program penunjang beserta indikator *outcome* programnya yaitu sebagai berikut : *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*

Untuk selanjutnya disusun rencana kegiatan dari setiap program yang telah ditetapkan dengan menentukan indikator *output* kegiatan yang mendukung pencapaian indikator *outcome* program. Penyusunan rencana kegiatan juga memperhatikan *Roadmap*. Dari rencana program dan kegiatan yang telah disusun, dilakukan pentahapan pencapaian target *outcome* program dan *output* kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2021-2023 disertai pagu indikatif anggaran sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 6.2**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan tahun 2021 – 2023 Barenlitbangda Kita Sawahlunto (Setelah Perubahan)**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab			
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan akuntabel	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah							Indek Kualitas Perencanaan (Peringkat PPD Tingkat Propinsi)		3	8,684,186,194	3	6,854,754,085	2	7,718,958,793	2	23,257,899,072		
Indikator : Nilai SAKIP								Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan		100		100		100		100			
		5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	1,838,000,000	100	960,000,000	100	813,872,750	100	3,611,872,750		
		5	1	2	2		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase kesesuaian sistematika dokumen perencanaan dengan aturan (%)		100	1,585,000,000	100	635,000,000	100	633,227,400	100	2,853,227,400	Bid Litbang (Baren)	
								Persentase PD yang Telah Memiliki Dokumen Perencanaan Yang Dan Selaras Baik, Kosisten		100		100		100		100			
								Persentase Usulan Masyarakat Melalui Musrembang Yang diakomodir Dalam Perencanaan		28.3		29		30		30			
								Persentase Kehadiran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrembang		100		100		100		100			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab			
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		5	1	2	2	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			1 Laporan	750,000,000	1 Laporan	50,000,000						
												1 Dokumen					1 Dokumen		
								1						1 Dokumen	50,000,000				
		5	1	2	2	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya					2 Dokumen	25,000,000				1 Dokumen		
														1 Dokumen	50,000,000				
		5	1	2	2	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik					1 Berita Acara	40,000,000				1 Berita Acara		
								1						1 Berita Acara	27,300,000				
		5	1	2	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD			26 Berita Acara	100,000,000	26 Berita Acara	50,000,000						
										12 Bulan									
								1						1 Berita Acara	19,850,000		1 Berita Acara		
		5	1	2	2	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			1 Laporan	60,000,000		95,000,000						
																			208,694,500

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab			
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Jumlah berita acara Musrenbang Kota (Berita Acara)					1 Berita Acara							
							<b>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</b>	<b>1</b>						<b>1 Berita Acara</b>	<b>53,694,500</b>		<b>1 Berita Acara</b>		
		5	1	2	2	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen untuk Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan				1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen			1 Dokumen		
							<b>Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan</b>							<b>Usulan</b>			<b>Usulan</b>		<b>25,000,000</b>
							Jumlah Aplikasi yang dikelola			1 Aplikasi									
							Jumlah Berita Acara Forum Konsultasi Publik			1 Berita Acara									
							Jumlah Dokumen Revisi RPJMD Sawahlunto yang disusun			1 Dokumen									
		5	1	2	2	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RKPD Perubahan yang disusun			1 Dokumen	675,000,000		350,000,000					
								Jumlah dokumen RKPD yang disusun			1 Dokumen								
								Pembayaran staff Programmer E-Plan			1 Orang								
								Jumlah Dokumen yang ditetapkan dengan Perwako											
							<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/R KPD</b>	<b>1</b>							<b>3 Dokumen</b>	<b>432,382,900</b>		<b>3 Dokumen</b>	<b>1,457,382,900</b>

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab			
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		5	1	2	2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian sistematika dokumen perencanaan dengan aturan (%)	100	100	85,000,000	100	120,000,000	100	127,851,900	100	332,851,900	Bid Litbang (Baren)	
							Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi						26 orang	100,000,000	26 orang	100,000,000		
		5	1	2	2	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Perencanaan Yang Tersedia		4275 Data	85,000,000	99 Data	120,000,000						
								Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang terbitkan	1					1 Buku	27,851,900	1 Buku	232,851,900		
		5	1	2	2		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi perencanaan pembangunan (laporan)		4 Laporan	168,000,000	4 Laporan	205,000,000	1 Laporan	52,793,450	9 Laporan	425,793,450	Bid Litbang (Baren)	
							Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi yang dilaksanakan		1 Laporan		1 Laporan							
								Jumlah Laporan Monitoring yang dilaksanakan		4 Laporan									
		5	1	2	2	3		Pembayaran staff Programmer E-Monev			1 Orang	168,000,000		205,000,000					
								Jumlah laporan pencapaian SDG					4 Laporan						
								Jumlah laporan evaluasi DAK					4 Laporan						
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		1					1 Laporan	52,793,450				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab		
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPd (%)		100	1,152,825,000	100	1,050,153,250	100	315,971,750	100	2,518,950,000	Bid Sosbud (Baren)
								Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) kedalam RKPd (%)		100		100		100		100		
								Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kedalam RKPd (%)		100		100		100		100		
								Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kedalam RKPd (%)		100 %		100 %		100 %		100 %		
		5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pembangunan Manusia Kedalam RKPd (%)		100 %	376,850,000	100 %	320,000,000	100 %	75,000,000	100 %	771,850,000	
								Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan Kedalam RKPd (%)		100 %		100 %		100 %		100 %		



Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab			
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		5	1	3	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pemerintahan		4 Laporan	25,000,000	4 Laporan	60,000,000						
								<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</b>	1					1 Dokumen	14,000,000	1 Dokumen	99,000,000		
		5	1	3	2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan (Laporan)		1 laporan	20,000,000	1 laporan	60,000,000						
								<b>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah</b>						4 Perangkat Daerah	12,000,000	4 Perangkat Daerah	92,000,000		
		5	1	3	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan (Laporan)		4 laporan	35,000,000	4 laporan	45,000,000						
								<b>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</b>						4 Laporan	10,000,000	4 Laporan	90,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab			
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		5	1	3	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				2 Laporan	30,000,000					30,000,000	
							<b>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan</b>							4 aporan			4 aporan		
							Jumlah Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/Kesejahteraan Masyarakat (Laporan)		4 laporan		4 laporan								
		5	1	3	2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Laporan)		4 laporan	131,850,000	4 laporan	45,000,000						
							Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Manusia (Laporan)		4 Laporan			4 Laporan							
							Pembayaran staff Bidang Perencanaan Pembangunan Sosbud		2 Orang			2 Orang							
							<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</b>							1 Dokumen	16,000,000		1 Dokumen	192,850,000	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab			
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Asistensi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kesejahteraan Masyarakat (Laporan)		1 laporan									
		5	1	3	2	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Laporan)		1 Laporan	65,000,000	1 Laporan	50,000,000						
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Manusia (Laporan)		1 Laporan		1 Laporan							
								<b>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia</b>						<b>4 Perangkat Daerah</b>	<b>14,000,000</b>	<b>4 Perangkat Daerah</b>	<b>129,000,000</b>		
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monev Penanggulangan Kemiskinan Daerah/Kesejahteraan Masyarakat (Laporan)		4 laporan		4 laporan							
		5	1	3	2	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Laporan)		4 laporan	100,000,000	4 laporan	30,000,000						

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab			
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Manusia (Laporan)		4 laporan		4 laporan								
							<b>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia</b>						<b>4 Perangkat Daerah</b>	<b>9,000,000</b>	<b>4 Perangkat Daerah</b>	<b>139,000,000</b>			
		5	1	3	2		Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Ekonomi Kreatif Ke Dalam RKPD (%)		100 %		100 %		100 %		100 %				<b>Bid Ekonomi (Baren)</b>
						<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian Ke Dalam RKPD (%)		100 %	<b>350,000,000</b>	100 %	<b>384,553,250</b>	100 %	<b>140,971,750</b>	100 %		<b>875,525,000</b>		
							Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Sumber Daya Alam Ke Dalam RKPD (%)		100 %		100 %		100 %		100 %				
		5	1	3	2	1	Jumlah Laporan Koordinasi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (Laporan)		0 laporan										
						<b>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</b>	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kreatif		4 laporan	110,000,000		141,065,250							
							Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Laporan)		4 laporan										

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Pembayaran staff Subid bidang Perencanaan Ekonomi		2 Orang								
				Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi (Laporan)				1 Laporan						
				Jumlah Laporan Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ekonomi Kerakyatan (Dokumen)				1 Dokumen						
				<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</b>						1 Dokumen	16,000,000	1 Dokumen	267,065,250	
				Jumlah Laporan Asistensi Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (Laporan)		1 laporan								
		5	1	3	2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	90,000,000		27,977,000		
				Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Laporan)		1 laporan		1 laporan					133,255,300	
				<b>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian</b>								6 Perangkat Daerah	15,278,300	6 Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab				
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)		
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
		5	1	3	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi		4 laporan	70,000,000	4 laporan	26,881,250					111,881,250		
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kreatif		4 laporan											
							<b>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian</b>						6 Perangkat Daerah	15,000,000	6 Perangkat Daerah					
		5	1	3	2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam		4 laporan	25,000,000	4 laporan	12,900,950							
								<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</b>						1 Dokumen	22,193,450	1 Dokumen	60,094,400			
		5	1	3	2	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam		1 laporan	20,000,000	1 laporan	12,254,800							



Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab			
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
															1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	350,975,000	
							Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Kebinamargaan dan Perhubungan		1 Laporan		1 Laporan							
								Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Keciaptakaryaan dan Kewilayahan		1 Laporan	40,000,000		25,300,000					83,300,000	
								<b>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur</b>							5 Perangkat Daerah	18,000,000	5 Perangkat Daerah		
							Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kebinamargaan dan Perhubungan		4 Laporan		4 Laporan							
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Keciaptakaryaan dan Kewilayahan			70,000,000		50,000,000					132,000,000	
										4 Laporan									



Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab		
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5 Perangkat Daerah	12,000,000	5 Perangkat Daerah		
		5	1	3	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kebinamargaan dan Perhubungan (laporan)			1 Laporan	10,000,000				2 Laporan	17,500,000	
								Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur						2 Laporan	7,500,000			
		5	1	3	2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Keciptakaryaan dan Kewilayahan (Laporan)		4 Laporan	25,000,000	4 Laporan	75,000,000				1 Dokumen	115,000,000
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						1 Dokumen	15,000,000			
		5	1	3	2	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Keciptakaryaan dan Kewilayahan (Laporan)		1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	25,300,000					

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab		
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5 Perangkat Daerah	15,000,000	5 Perangkat Daerah	60,300,000	
		5	1	3	2	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Keciptakaryaan dan Kewilayahan (Laporan)		4 Laporan	35,000,000	4 Laporan	50,000,000					
														5 Perangkat Daerah	10,000,000	5 Perangkat Daerah	95,000,000	
						8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Keciptakaryaan dan Kewilayahan (Laporan)				4 Laporan	10,000,000					
														2 Laporan	7,500,000	2 Laporan	17,500,000	
	Meningkatkan Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah	5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan (Proposal)	20 Proposal	40 Proposal	199,000,000	40 Proposal	235,000,000	40 Proposal	338,363,300	120 Proposal	772,363,300	Bid Litbang (Baren)
		5	5	2	2		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen yang disusun (Dok)		116 Dokumen	199,000,000	.....Dokumen	235,000,000		338,363,300		772,363,300	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab			
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
								Persentase hasil penelitian yang ditindak lanjuti stakeholder											
								Indeks Inovasi Daerah		Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		Sangat Inovatif		Sangat Inovatif			
								Jumlah Kegiatan yang Difasilitasi (Keg)		116 Kegiatan		116 Kegiatan							
		5	5	2	2	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen pengkajian yang disusun		1 Dokumen	124,000,000	1 Dokumen	80,000,000						
							Pembayaran staff Subid Pengkajian dan Analisa Pembangunan		1 Orang										
								Jumlah Kegiatan Kelitbangan yang difasilitasi				2 Kegiatan							
								Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1					1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	354,000,000		
		5	5	2	2	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Inovasi yang disusun		1 Dokumen	75,000,000	2 Dokumen	115,000,000						
								Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1					1 Laporan	88,363,300	1 Laporan	278,363,300		
		5	5	2	2	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dokumentasi Pelaksana Kegiatan				2 Dokumen	40,000,000			1 Laporan	140,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab			
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>							1 Laporan	100,000,000				
	Terwujudnya OPD Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12 Bulan	5,494,361,194	12 Bulan	4,609,600,835	12 Bulan	6,250,750,993	12 Bulan	16,354,713,022		Bid Sekretariat (Baren)
		5	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan (bulan)		12 Bulan	3,764,986,156	12 Bulan	3,560,907,930	12 Bulan	4,830,750,529	12 Bulan	12,156,644,615		
							Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)		12 Bulan			12 Bulan							
		5	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya		13 Bulan	3,564,236,156	13 Bulan	3,401,856,250						
								<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>						37 Org/Bln	4,830,750,529	37 Org/Bln	12,156,644,615		
		5	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran staff Administrasi Keuangan		1 Orang	200,750,000	-	159,051,680						
							Penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan		12 bulan			12 bulan							
								<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>						Dokumen		okumen	359,801,680		
		5	1	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur Yang Meningkatkan SDM nya (%)		38 %	150,000,000		100,000,000		30,000,000		280,000,000		
		5	1	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		15 orang	150,000,000		100,000,000			8 orang	280,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab			
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal bagi fungsional tertentu		15 orang										
							Jumlah Pegawai yang Meningkatkan Kopetensinya				16 orang								
							<b>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</b>						8 Orang	30,000,000					
		5	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)	12 Bulan	904,720,038	12 bulan	332,400,155	12 bulan	584,996,164	12 bulan		1,822,116,357		
		5	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 bulan	6,035,000	12 bulan	10,034,560							
							<b>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor yang Disediakan</b>						1 Paket	10,500,000	1 Paket		26,569,560		
		5	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan										
								Jasa kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan										
								Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 unit	138,775,663									
								Pembayaran staff Kebersihan Kantor	1 Orang			79,073,065							
								Tersedianya Bahan Dekorasi dan Pakaian Adat Daerah	12 Bulan										
								Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan					12 bulan						



Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab			
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		5	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)		12 Bulan	119,655,000	12 Bulan	326,422,000	12 Bulan	400,004,300	12 Bulan	846,081,300		
		5	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan		12 bulan	78,735,000	12 bulan	19,410,000						
							Pembayaran staff Administrasi Umum			3 Orang	-	-	-						
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1 Laporan	4,000,000	1 Laporan	102,145,000		
		5	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 bulan	40,920,000	12 bulan	40,912,000						
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						1 Laporan	55,000,000	1 Laporan	136,832,000		
		5	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan	266,100,000						
								Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						1 Laporan	341,004,300	1 Laporan	607,104,300		
		5	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)		12 Bulan	205,000,000	12 Bulan	137,788,000	19 Unit	230,000,000	19 Unit	572,788,000		
		5	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara		16 unit	120,000,000	16 unit	100,000,000						

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab			
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan					12 Bulan							
							<b>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</b>							19 Unit	180,000,000	19 Unit	400,000,000		
		5	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara		12 bulan	30,000,000	12 bulan	19,848,000						
							<b>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</b>							1 Unit	20,000,000	1 Unit	69,848,000		
		5	1	1	2	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan gedung kantor yang dipelihara		12 bulan	55,000,000	12 bulan	17,940,000						
							<b>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</b>							1 Unit	30,000,000	1 Unit	102,940,000		



## **BAB VII**

# **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Barenlitbangda Kota Sawahlunto dalam rangka mendukung visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan penyesuaian dari IKU Barenlitbangda dalam Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 sebelum perubahan. Adapun Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 tersaji dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 7.1**  
**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BARENLITBANGDA KOTA SAWAHLUNTO**  
**TAHUN 2018-2023 (Sebelum Perubahan)**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA (2017)	CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN KE-									
			2018			2019			2020			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	
1	2	B	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	<i>Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD</i>	-	100	100	100	100	100	100	100	100	91,9	92
2	<i>Persentase Keselarasan Renstra OPD dengan RPJMD</i>	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	<i>Persentase Keselarasan Renja OPD dengan RKPD</i>	-	97	97	100	100	108	108	108	108	117,2	117
4	<i>Persentase Keselarasan RPJMD dengan RTRW</i>	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	<i>Nilai SAKIP</i>	-	B	BB	119	B	BB	119	B	BB	119	119

Selanjutnya dalam Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 tersaji indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ada. Adapun Indikator Kinerja Barenlitbangda Kota Sawahlunto yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Sawahlunto tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 7.2**  
**RENCANA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BARENLITBANGDA KOTA SAWAHLUNTO**  
**TAHUN 2021-2023 (Setelah Perubahan)**

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA (2020)	TARGET TAHUN KE-			KONDISI AKHIR RENSTRA
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Kualitas Perencanaan (Peringkat PPD tingkat Provinsi)	-	3	3	2	2
2.	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan	-	100	100	100	100
3.	Persentase OPD yang Telah Memiliki Dokumen Perencanaan yang Baik, Konsisten dan Selaras	-	100	100	100	100
4.	Persentase Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang yang Diakomodir Dalam Perencanaan Pembangunan	-	28,3	29	30	30
5.	Persentase Kehadiran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang	-	100	100	100	100
6.	Persentase Hasil Penelitian yang Ditindaklanjuti Stakeholder	-	100	100	100	100
7.	Indeks Inovasi Daerah	-	BB	A	A	A
8.	Nilai LAKIP Barenlitbangda		BB	A	A	A

## **B A B VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra diharapkan menjadi panduan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja tahunan Barenlitbangda yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hingga tahun 2023. Perlu komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Selanjutnya Perubahan Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Barenlitbangda Kota Sawahlunto dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2018–2023 serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Barenlitbangda Kota Sawahlunto, yaitu sejak Perubahan Renja Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2020 dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sumber pendanaan, serta komitmen semua unsur. Hal yang tidak kalah penting untuk keberhasilan pelaksanaan Renstra adalah evaluasi untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan dari rencana strategis ini yang akan dilaksanakan setiap tahun. Sebagai penutup, Perubahan Renstra Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2018–2023 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Barenlitbangda beserta *stake holder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Barenlitbangda secara berkesinambungan yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sawahlunto, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Barenlitbangda Kota Sawahlunto.

Sawahlunto, Desember 2021  
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO

**Ir. LELIS EPRIENTI, MSi**  
NIP. 19670404 199403 2 008

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab			
									Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan akuntabel	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Daerah						Indek Kualitas Perencanaan (Peringkat PPD Tingkat Propinsi)		3	8.684.186.194	3	6.854.754.085	2	7.718.958.793	2	23.257.899.072		
Indikator : IndekReformasi Birokrasi							Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan		100		100		100		100			
		5	1	2		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi program RPJMD kedalam RKPD (%)	100	100	1.838.000.000	100	960.000.000	100	813.872.750	100	3.611.872.750		
		5	1	2	2	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase kesesuaian sistematika dokumen perencanaan dengan aturan (%)		100	1.585.000.000	100	635.000.000	100	633.227.400	100	2.853.227.400		Bid Litbang (Baren)
							Persentase PD yang Telah Memiliki Dokumen Perencanaan Yang Dan Selaras Baik, Kosisten		100		100		100		100			
							Persentase Usulan Masyarakat Melalui Musrembang Yang diakomodir Dalam Perencanaan		28,3		29		30		30			
							Persentase Kehadiran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrembang		100		100		100		100			
		5	1	2	2	1 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Tenaga Ahli		1 Laporan	750.000.000	1 Laporan	50.000.000						
							Jumlah draft dokumen RKPD yang disusun				1 Dokumen				1 Dokumen		850.000.000	
							Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1					1 Dokumen	50.000.000				
		5	1	2	2	2 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen yang di telaah				2 Dokumen	25.000.000			1 Dokumen	75.000.000		
							Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah						1 Dokumen	50.000.000				
		5	1	2	2	3 Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita acara forum konsultasi public				1 Berita Acara	40.000.000			1 Berita Acara	67.300.000		
							Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1					1 Berita Acara	27.300.000				
		5	1	2	2	4 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Pembahasan Renja		26 Berita Acara	100.000.000	26 Berita Acara	50.000.000						
							Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan		12 Bulan								169.850.000	
							Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1					1 Berita Acara	19.850.000	1 Berita Acara			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab		
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
										7	8	9	10	11	12		13	14
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		5	1	2	2	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara pembahasan Musrenbang RKPD (Laporan)		1 Laporan	60.000.000		95.000.000					
								Jumlah berita acara Musrenbang Kota (Berita Acara)				1 Berita Acara					208.694.500	
								<b>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</b>	<b>1</b>					<b>1 Berita Acara</b>	<b>53.694.500</b>	<b>1 Berita Acara</b>		
		5	1	2	2	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen untuk Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan				1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen			25.000.000	
								<b>Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan</b>						<b>Usulan</b>		<b>Usulan</b>		
		5	1	2	2	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang dikelola	1 Aplikasi	675.000.000	350.000.000							
								Jumlah Berita Acara Forum Konsultasi Publik	1 Berita Acara									
								Jumlah Dokumen Revisi RPJMD Sawahlunto yang disusun	1 Dokumen									
								Jumlah Dokumen RKPD Perubahan yang disusun	1 Dokumen									
								Jumlah dokumen RKPD yang disusun	1 Dokumen									
								Pembayaran staff Programmer E-Plan	1 Orang									
								Jumlah Dokumen yang ditetapkan dengan Perwako						2 Dokumen				
							<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)</b>	<b>1</b>					<b>3 Dokumen</b>	<b>432.382.900</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>1.457.382.900</b>		
		5	1	2	2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian sistematika dokumen perencanaan dengan aturan (%)	100	100	85.000.000	100	120.000.000	100	127.851.900	100	332.851.900	Bid Litbang (Baren)
							Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi					26 orang	100.000.000	26 orang	100.000.000		
		5	1	2	2	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Perencanaan Yang Tersedia	4275 Data	85.000.000	99 Data	120.000.000			<b>1 Buku</b>	<b>232.851.900</b>		
								<b>Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang terbitkan</b>	<b>1</b>					<b>1 Buku</b>	<b>27.851.900</b>			
		5	1	2	2		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi perencanaan pembangunan (laporan)	4 Laporan	168.000.000	4 Laporan	205.000.000	1 Laporan	52.793.450	9 Laporan	425.793.450	Bid Litbang (Baren)	
		5	1	2	2	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi yang dilaksanakan	1 Laporan	168.000.000	205.000.000	1 Laporan						
								Jumlah Laporan Monitoring yang dilaksanakan	4 Laporan			4 Laporan						
								Pembayaran staff Programmer E-Monev	1 Orang									
								Jumlah laporan pencapaian SDG						4 Laporan				
								Jumlah laporan evaluasi DAK						4 Laporan				
														<b>1 Laporan</b>	<b>425.793.450</b>			

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	1					1 Laporan	52.793.450			
		5	1	3		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia kedalam RKPD (%)		100	1.152.825.000	100	1.050.153.250	100	315.971.750	100	2.518.950.000	Bid Sosbud (Baren)
							Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) kedalam RKPD (%)		100		100		100		100		
							Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan kedalam RKPD (%)		100		100		100		100		
						Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Kesejahteraan Masyarakat Kedalam RKPD (%)		100 %		100 %		100 %		100 %		
		5	1	3	2		Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pembangunan Manusia Kedalam RKPD (%)		100 %	376.850.000	100 %	320.000.000	100 %	75.000.000	100 %	771.850.000	
							Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan Kedalam RKPD (%)		100 %		100 %		100 %		100 %		
		5	1	3	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pemerintahan	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	60.000.000					
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1					1 Dokumen	14.000.000	1 Dokumen	99.000.000	
		5	1	3	2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan (Laporan)	1 laporan	20.000.000	1 laporan	60.000.000					
							Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah						4 Perangkat Daerah	12.000.000	4 Perangkat Daerah	92.000.000	
		5	1	3	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan (Laporan)	4 laporan	35.000.000	4 laporan	45.000.000					

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab			
									Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
									Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)	
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	90.000.000		
			5	1	3	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				2 Laporan	30.000.000			30.000.000	
								Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan							4 aporan		4 aporan	
			5	1	3	2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah/Kesejahteraan Masyarakat (Laporan)	4 laporan			4 laporan					
							Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Laporan)		4 laporan	131.850.000			4 laporan	45.000.000				
							Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Manusia (Laporan)		4 Laporan				4 Laporan					
							Pembayaran staff Bidang Perencanaan Pembangunan Sosbud		2 Orang				2 Orang					
								Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						1 Dokumen	16.000.000	1 Dokumen	192.850.000	
			5	1	3	2	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Asistensi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kesejahteraan Masyarakat (Laporan)	1 laporan								
							Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Laporan)		1 Laporan	65.000.000			1 Laporan	50.000.000				
							Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Manusia (Laporan)		1 Laporan				1 Laporan					
								Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia						4 Perangkat Daerah	14.000.000	4 Perangkat Daerah	129.000.000	
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Monev Penanggulangan Kemiskinan Daerah/Kesejahteraan Masyarakat (Laporan)	4 laporan				4 laporan					





Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
										7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		5	1	3	2	2	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kreatif		1 Laporan	90.000.000		27.977.000					
								Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Laporan)		1 laporan			1 laporan					
								<b>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian</b>						6 Perangkat Daerah	15.278.300	6 Perangkat Daerah	133.255.300	
		5	1	3	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi		4 laporan	70.000.000		4 laporan	26.881.250				
								Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kreatif		4 laporan								111.881.250
								<b>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian</b>						6 Perangkat Daerah	15.000.000	6 Perangkat Daerah		
		5	1	3	2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam		4 laporan	25.000.000		4 laporan	12.900.950				
								<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</b>						1 Dokumen	22.193.450	1 Dokumen	60.094.400	
		5	1	3	2	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam		1 laporan	20.000.000		1 laporan	12.254.800				
								<b>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA</b>						2 Perangkat Daerah	60.000.000	2 Perangkat Daerah	92.254.800	
		5	1	3	2	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam		4 laporan	35.000.000		4 laporan	163.474.000				
								Jumlah Dokumen Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah (Dokumen)					1 Dokumen					
								<b>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA</b>						2 Perangkat Daerah	12.500.000	2 Perangkat Daerah	210.974.000	

Tujuan	Sasaran	Kode				Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab		
									Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
									Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)
									7	8	9	10	11	12		13	14
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		5	1	3	2	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Presentase konsistensi program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Ke dalam RKPD (%)		100%	425.975.000	100%	345.600.000	100%	100.000.000	100%	871.575.000	Bid Infrastruktur dan Kewilayahan (Baren)
		5	1	3	2	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kebinamargaan dan Perhubungan (Laporan)	4 Laporan	235.975.000	4 Laporan	100.000.000					
							Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	10 Laporan									
													1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	350.975.000	
		5	1	3	2	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Kebinamargaan dan Perhubungan	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	25.300.000				83.300.000	
							Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	1 Laporan									
													5 Perangkat Daerah	18.000.000	5 Perangkat Daerah		
		5	1	3	2	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Kebinamargaan dan Perhubungan	4 Laporan	70.000.000	4 Laporan	50.000.000				132.000.000	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Keciaptakaryaan dan Kewilayahan	4 Laporan									
													5 Perangkat Daerah	12.000.000	5 Perangkat Daerah		
		5	1	3	2	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Kebinamargaan dan Perhubungan (laporan)			1 Laporan	10.000.000			2 Laporan	17.500.000	
													2 Laporan	7.500.000			

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
										7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		5	1	3	2	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Keciaptakaryaan dan Kewilayahan (Laporan)		4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	75.000.000					
														1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	115.000.000	
		5	1	3	2	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Asistensi Perencanaan Pembangunan Keciaptakaryaan dan Kewilayahan (Laporan)		1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	25.300.000					
														5 Perangkat Daerah	15.000.000	5 Perangkat Daerah	60.300.000	
		5	1	3	2	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Keciaptakaryaan dan Kewilayahan (Laporan)		4 Laporan	35.000.000	4 Laporan	50.000.000					
														5 Perangkat Daerah	10.000.000	5 Perangkat Daerah	95.000.000	
						8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergisitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Keciaptakaryaan dan Kewilayahan (Laporan)				4 Laporan	10.000.000					
														2 Laporan	7.500.000	2 Laporan	17.500.000	
		5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Jumlah Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan (Proposal)	20 Proposal	40 Proposal	199.000.000	40 Proposal	235.000.000	40 Proposal	338.363.300	120 Proposal	772.363.300	Bid Litbang (Baren)
		5	5	2	2		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen yang disusun (Dok)		116 Dokumen	199.000.000	.....Dokumen	235.000.000		338.363.300		772.363.300	
								Persentase hasil penelitian yang ditindak lanjuti stakeholder										
								Indeks Inovasi Daerah		Sangat Inivatif				Sangat Inivatif				
								Jumlah Kegiatan yang Difasilitasi (Keg)		116 Kegiatan				116Kegiatan				
		5	5	2	2	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen pengkajian yang disusun		1 Dokumen								
								Pembayaran staff Subid Pengkajian dan Analisa Pembangunan		1 Orang	124.000.000		80.000.000					
								Jumlah Kegiatan Kelibangan yang difasilitasi						2 Kegiatan				

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	
										7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1					1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	354.000.000		
		5	5	2	2	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Inovasi yang disusun		1 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	115.000.000					
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1					1 Laporan	88.363.300	1 Laporan	278.363.300		
		5	5	2	2	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Dokumentasi Pelaksana Kegiatan				2 Dokumen	40.000.000					
							Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan						1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	140.000.000		
		5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Urusan Pemerintah Daerah Berjalan Lancar dan Tertib (Bulan)		12 Bulan	5.494.361.194	12 Bulan	4.609.600.835	12 Bulan	6.250.750.993	12 Bulan	16.354.713.022	Bid Sekretariat (Baren)
		5	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Keuangan (bulan)		12 Bulan	3.764.986.156	12 Bulan	3.560.907.930	12 Bulan	4.830.750.529	12 Bulan	12.156.644.615	
								Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)		12 Bulan		12 Bulan						
		5	1	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan PNS Lainnya		13 Bulan	3.564.236.156	13 Bulan	3.401.856.250					
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						37 Org/Bln	4.830.750.529	37 Org/Bln	11.796.842.935		
		5	1	1	2	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pembayaran staff Administrasi Keuangan		1 Orang	200.750.000	-	159.051.680					
								Penatausahaan keuangan dan barang yang dilaksanakan		12 bulan		12 bulan						
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						Dokumen		okumen	359.801.680		
		5	1	1	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Aparatur Yang Meningkatkan SDM nya (%)		38 %	150.000.000		100.000.000		30.000.000		280.000.000	
		5	1	1	2	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		15 orang	150.000.000		100.000.000					
								Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal bagi fungsional tertentu		15 orang								
								Jumlah Pegawai yang Meningkatkan Kopetensinya				16 orang						
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan						8 Orang	30.000.000				
		5	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)		12 Bulan	904.720.038	12 bulan	332.400.155	12 bulan	584.996.164	12 bulan	1.822.116.357	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab			
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)	
										7	8	9	10	11	12		13	14	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		5	1	1	2	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		12 bulan	6.035.000	12 bulan	10.034.560						
								<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor yang Disediakan</i>						1 Paket	10.500.000	1 Paket	26.569.560		
		5	1	1	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	12 bulan	138.775.663		79.073.065							
							Jasa kebersihan kantor yang disediakan	12 bulan											
							Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	1 unit											
							Pembayaran staff Kebersihan Kantor	1 Orang											
							Tersedianya Bahan Dekorasi dan Pakaian Adat Daerah	12 Bulan											
							Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan				12 bulan			2 Paket	175.206.050	2 Paket	393.054.778		
							<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>												
		5	1	1	2	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan minuman yang disediakan	12 Bulan	31.065.500		52.030.000							
							Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan				12 Bulan								
							<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>							1 Paket	40.290.114	1 Paket	123.385.614		
		5	1	1	2	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 bulan	47.343.875	12 bulan	57.343.750							
							<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaanyang Disediakan</i>							2 Paket	54.000.000	2 Paket	158.687.625		
		5	1	1	2	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang difasilitasi	12 bulan	681.500.000	12 bulan	133.918.780							
							<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>						1 Laporan	305.000.000	1 Laporan	1.120.418.780		
		5	1	1	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)	12 Bulan	350.000.000	12 Bulan	152.082.750			175.000.000		677.082.750		
		5	1	1	2	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional roda dua yang diadakan	6 Unit	350.000.000	1 Unit	152.082.750					502.082.750		
							<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>							5 Unit	175.000.000	5 Unit	677.082.750		
		5	1	1	2		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)	12 Bulan	119.655.000	12 Bulan	326.422.000	12 Bulan	400.004.300	12 Bulan		846.081.300		
		5	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa surat menyurat yang disediakan	12 bulan	78.735.000	12 bulan	19.410.000							
							Pembayaran staff Administrasi Umum	3 Orang											
							<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>							1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	102.145.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab			
										Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023			Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
										Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		Target	Pagu (Rp)	
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		5	1	1	2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		12 bulan	40.920.000	12 bulan	40.912.000						
								<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>						1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	136.832.000		
		5	1	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan	266.100.000						
								<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>						1 Laporan	341.004.300	1 Laporan	607.104.300		
		5	1	1	2		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran (bulan)		12 Bulan	205.000.000	12 Bulan	137.788.000	19 Unit	230.000.000	19 Unit	572.788.000		
		5	1	1	2	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara		16 unit	120.000.000	16 unit							
								Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan				12 Bulan		100.000.000					
								<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>						19 Unit	180.000.000	19 Unit	400.000.000		
		5	1	1	2	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara		12 bulan	30.000.000	12 bulan	19.848.000						
								<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>						1 Unit	20.000.000	1 Unit	69.848.000		
		5	1	1	2	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan gedung kantor yang dipelihara		12 bulan	55.000.000	12 bulan	17.940.000						
								<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i>						1 Unit	30.000.000	1 Unit	102.940.000		

VISI  
MISI 4  
TUJUAN 1

SASARAN 1  
INDIKATOR

SASARAN ESEKON 2  
INDIKATOR

SASARAN ESEKON 3  
INDIKATOR

SASARAN ESEKON 3  
INDIKATOR

SASARAN ESEKON 3  
INDIKATOR

SASARAN ESEKON 3  
INDIKATOR

SASARAN INDIVIDU  
INDIKATOR

SASARAN INDIVIDU  
INDIKATOR

SASARAN INDIVIDU  
INDIKATOR

SASARAN INDIVIDU  
INDIKATOR

PROGRAM  
INDIKATOR

KEGIATAN  
INDIKATOR

SUB KEGIATAN  
INDIKATOR

SUB KEGIATAN  
INDIKATOR

KEGIATAN  
INDIKATOR

SUB KEGIATAN  
INDIKATOR

KEGIATAN  
INDIKATOR

SUB KEGIATAN  
INDIKATOR

PROGRAM  
INDIKATOR

KEGIATAN  
INDIKATOR

SUB KEGIATAN  
INDIKATOR

DENGAN KERESKAMAN KITA WUJUDKAN SABAHLUNTO SEBAGAI KOTA WSATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL,  
BERMARTABAT, BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

MEMBUKAKAN PEMERINTAHAN YANG BAK, BERKON DAN BERKUALITAS

MEMULAGI KITA MELAKUKAN PEMERINTAHAN YANG BAK, BERKON DAN BERKUALITAS

KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

Tingkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas

Nilai SAKIP

Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Peningkat PPD Tingkat Proses, Persentase Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan, Persentase PPD yang Tidak Memiliki Dokumen Perencanaan Yang Sesuai RAB Dan Kesenjangan

Meningkatkan Kualitas Hasil Penelitian dan Pengembangan Daerah

Indeks Inovasi Daerah, Persentase Hasil Penelitian yang diadopsikan Stakeholder

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Table with 4 columns: Meningkatkan Tingkat Capaian Kinerja Pembangunan Perangal Daerah, Meningkatkan Keterkaitan Perangal Daerah, Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Perencanaan, Meningkatkan Kualitas Hasil Kolaborasi dan Pengembangan Daerah. Includes indicators like 'Persentase Keterkaitan Dokumen Perencanaan' and 'Persentase PPD yang Tidak Memiliki Dokumen Perencanaan'.

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Table with 2 columns: Meningkatkan Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan PO Bid. Ekonomi, Meningkatkan Capaian Kinerja Pembangunan PO Bid. Ekonomi. Includes indicators like 'Persentase Keterkaitan Dokumen Perencanaan' and 'Persentase Indikator RPJMD yang Tercapai (%)'.

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA

Table with 2 columns: Meningkatkan Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan PO Bid. Sosial Budaya, Meningkatkan Capaian Kinerja Pembangunan PO Bid. Sosial Budaya. Includes indicators like 'Persentase Keterkaitan Dokumen Perencanaan' and 'Persentase Indikator RPJMD yang Tercapai (%)'.

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KOTA

Table with 2 columns: Meningkatkan Keterkaitan Dokumen Perencanaan Pembangunan PO Bid. Infrastruktur, Meningkatkan Capaian Kinerja Pembangunan PO Bid. Infrastruktur. Includes indicators like 'Persentase Keterkaitan Dokumen Perencanaan' and 'Persentase Indikator RPJMD yang Tercapai (%)'.

Table with 4 columns: Meningkatkan Usah Berkon - Up yang Berkon, Meningkatkan Usah Berkon - Kolaborasi, Meningkatkan Pemanfaatan Kegiatan Kolaborasi, Meningkatkan Keterkaitan Data dan Informasi Perencanaan, Meningkatkan Data Kritis Implementasi Program Kegiatan. Includes indicators like 'Persentase Usah yang Berkon (%)' and 'Persentase Keterkaitan Dokumen Perencanaan'.

Table with 3 columns: Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan PO Sosial Mitra, Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan PO Sosial Mitra, Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan PO Sosial Mitra. Includes indicators like 'Persentase PPD dengan Konsistensi Program' and 'Persentase PPD yang Mencapai Target Kinerja (%)'.

Table with 3 columns: Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan PO Sosial Mitra, Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan PO Sosial Mitra, Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan PO Sosial Mitra. Includes indicators like 'Persentase PPD dengan Konsistensi Program' and 'Persentase PPD yang Mencapai Target Kinerja (%)'.

Table with 3 columns: Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan PO Sosial Mitra, Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan PO Sosial Mitra, Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan PO Sosial Mitra. Includes indicators like 'Persentase PPD dengan Konsistensi Program' and 'Persentase PPD yang Mencapai Target Kinerja (%)'.

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD (%)

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD (%)

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD (%)

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD (%)

KEGIATAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN

Persentase Kesesuaian Sistematis Dokumen Perencanaan dengan Aturan (%)

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)

Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA Kedalam RKPD (%)

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kedalam RKPD (%)

KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Persentase Konsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Wilayah Kedalam RKPD (%)

Table with 4 columns: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya. Includes indicators like 'Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah' and 'Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencanabangsa'.

Table with 4 columns: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya. Includes indicators like 'Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah' and 'Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencanabangsa'.

Table with 4 columns: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya. Includes indicators like 'Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah' and 'Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencanabangsa'.

Table with 4 columns: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Kebijakan Lainnya. Includes indicators like 'Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah' and 'Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Rencanabangsa'.

KEGIATAN ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase Data Perencanaan yang Terpenuhi (%)

Table with 2 columns: Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten Kota, Pembinaan dan Pemantauan dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangal Daerah. Includes indicators like 'Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah' and 'Jumlah Orang yang Dibina'.

KEGIATAN PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jumlah Laporan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (laporan)

Table with 2 columns: Monitoring Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Includes indicators like 'Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah'.

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jumlah Kajian dan Proposal Inisiatif Inovasi Daerah yang Terevaluasi dan Diterapkan

KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI

Jumlah Laporan Evaluasi Perencanaan Pembangunan (laporan)

Table with 3 columns: Diseminasi Jark, Prosedur Dan Model Pengembangan Perencanaan Daerah Yang Berhasil Inovatif, Penilaian Pengembangan Dan Penguasaan & Bidang Teknologi Dan Inovasi, Sosialisasi Dan Diseminasi Hasil Hasil Kolaborasi. Includes indicators like 'Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jark, Prosedur dan Model Pengembangan Perencanaan Daerah' and 'Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Rencanabangsa'.